



**Strategi Pelaksanaan Program Keluarga
Berencana Berbasis Hak untuk Percepatan
Akses Terhadap Pelayanan Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi
dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Indonesia**

**RENCANA BIAYA PELAKSANAAN
(2017-2019)**

**Strategi Pelaksanaan Program Keluarga
Berencana Berbasis Hak untuk Percepatan
Akses Terhadap Pelayanan Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi
dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Indonesia**

**RENCANA BIAYA PELAKSANAAN
(2017-2019)**

Daftar Isi

I. Ringkasan Eksekutif	4
II. Latarbelakang	8
III. Metodologi, Asumsi dan Sumber Daya	8
A. Komoditas Kontrasepsi	8
B. Biaya Kegiatan.....	11
Biaya Pelayanan KB	11
Biaya Unit	12
Tiket Penerbangan Antara Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi	14
Fasilitas Kesehatan dan Staf Kesehatan	15
Pertemuan	15
Jumlah Pertemuan	19
Pelatihan	19
Pemantauan dan Pengawasan	22
Konsultasi	23
Komunikasi Informasi Edukasi/ Kemonikasi Perubahan Perilaku (KIE/KPP)	23
Publikasi	23
IV. Hasil Pembiayaan	25
A. Komoditas Kontrasepsi	25
B. Total Biaya Jasa Pelayanan KB - JKN	32
C. Total Biaya Peta Jalan Keluarga Berencana (KB)	32

September 2017
 Eva Weissman, ew44@columbia.edu
 Muhamad Faozi Kurniawan, muhfaozi@gmail.com

Daftar Tabel

Tabel 1. Total Biaya Berdasarkan Tujuan Strategis	6
Tabel 2. Rencana Biaya Pelaksanaan di Indonesia Tahun 2017-2019 – Rinkasan Berdasar Keluaran	7
Tabel 3. Asumsi dan Sumber Data Untuk Proyeksi Keluarga Berencana	10
Tabel 4. Standar Tarif Untuk Jasa Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana	12
Tabel 5. Biaya Unit yang Digunakan di Dalam Pembiayaan Kegiatan dalam CIP	13
Tabel 6. Tiket Pesawat Dari Jakarta Ke Beberapa Kab./ Kota	15
Tabel 7. Jumlah Provinsi, Number of Provinsis, Kab./ Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan Staf Kese- hatan	16
Tabel 8. Tipe Pertemuan.....	16
Tabel 9. Pertemuan 1: Pertemuan Tingkat Provinsi-/Kab./ Kota – Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (di Kantor Provinsi/Kab./ Kota)	17
Tabel 10. Pertemuan 2: Pertemuan Tingkat Provinsi-/Kab./ Kota - (di Hotel)	17
Tabel 11. Pertemuan 3: Pertemuan Tingkat Provinsi - Workshop (di Hotel)	17
Tabel 12. Pertemuan 4: Pertemuan Tingkat Pusat - Pertemuan Kelompok Kerja (di Kantor BKKBN atau Kemen- kes)	18
Tabel 13. Pertemuan 5: Pertemuan Tingkat Pusat - Workshop/Stakeholder (di Hotel)	18
Tabel 14. Pertemuan 6: Pusat Level, High-level Pertemuan (50 people, local participants)	19
Tabel 15. Pertemuan 7: Pertemuan Tingkat Pusat (50 peserta, 34 dari Provinsi)	19
Tabel 16. Pelatihan 1: ToT di Tingkat Pusat	20
Tabel 17. Pelatihan 2: ToT di Tingkat Provinsi	21
Tabel 18. Pelatihan 3: ToT di Tingkat Kabupaten/ Kota	21
Tabel 19. Pelatihan 4: Pelatihan Klinis di Tingkat Provinsi (Penyedia Layanan Kesehatn dan lainnya)	22
Tabel 20. Pelatihan 5: Pelatihan di Tingkat Kabupaten/ Kota (Manajemen)	22
Tabel 21. Kunjungan Supervisi dan Pertemuan (dari Pusat ke Provinsi)	23
Tabel 22. Kunjungan Supervisi dan Pertemuan (dari Provinsi ke Kab./ Kota)	23
Tabel 23. Kunjungan Supervisi (Kab./ Kota, hanya observasi)	24
Tabel 24. Rencana Strategis BKKBN KIE dan Biaya Advokasi	24
Tabel 25. Proyeksi Biaya untuk KIE	24
Tabel 26. Total Jumlah Pengguna Kontrasepsi.....	26
Tabel 27. Total Jumlah Komoditas yang Dibutuhkan dan Biaya Komoditas.....	27
Tabel 28. Biaya yang dibutuhkan untuk Obat Lain dan Persediaan.....	31
Tabel 29. Total Biaya Komoditas dan Persediaan.....	31
Tabel 30. Total Biaya Komoditas dan Termasuk Biaya Transportasi	31
Tabel 31. Estimasi Total Jasa Pelayanan untuk Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana Tingkat Nasional	33
Tabel 32. Total Rekapitulasi Biaya	33

Daftar Gambar

Gambar 1. Total Biaya untuk Tujuan Strategis	5
Gambar 2. Total Biaya Berdasarkan Aktifitas	6
Gambar 3. Prosentase Wanita Menikah yang Menggunakan Metode Berbeda	11
Gambar 4. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi Berdasarkan Metode (Rupiah)	28
Gambar 5. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi Berdasarkan Metode (US\$)	28
Gambar 6. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi (diluar biaya transportasi) berdasarkan Pulau	29
Gambar 7. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi berdasarkan Provinsi	30
Gambar 8. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi dan Persediaan (Termasuk biaya Transportasi) berdasarkan Metode (Rupiah)	32
Gambar 9. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi dan Persediaan (Termasuk biaya Transportasi) berdasarkan Metode (US\$)	32

I. Ringkasan Eksekutif

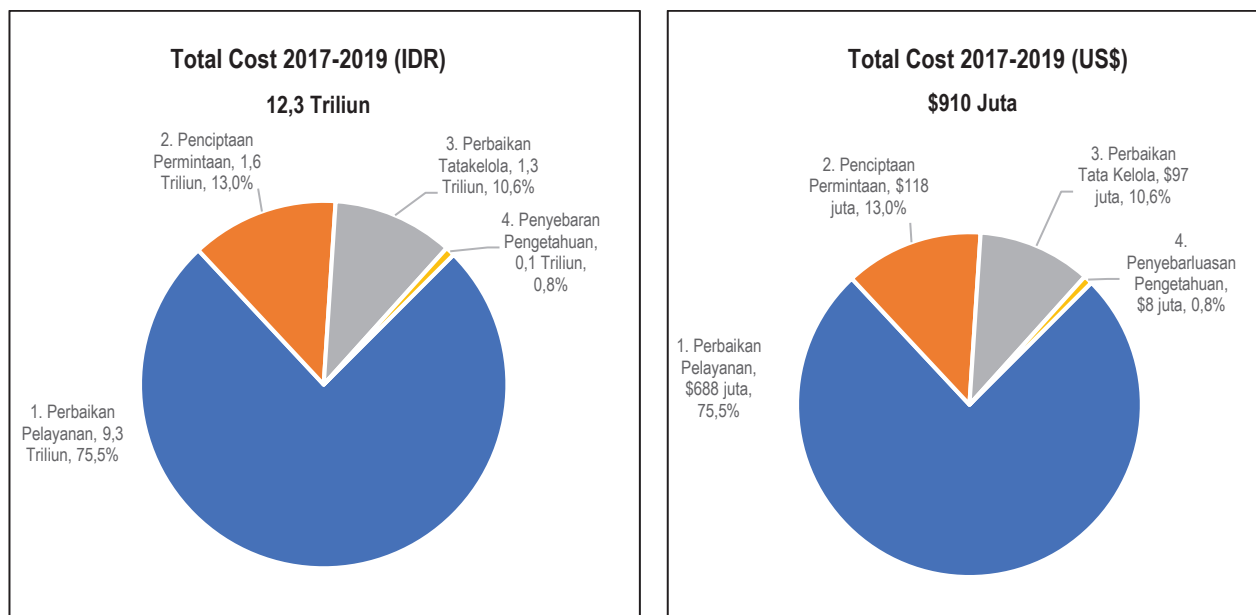
Strategi Nasional Keluarga Berencana berbasis Hak (2017-2019) dikembangkan dengan mengintegrasikan rencana-rencana pemerintah yang sudah ada, dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk target FP2020 di Indonesia. Untuk menerapkan strategi ini, sebuah *road map* (peta jalan) dikembangkan dengan menguraikan kegiatan-kegiatan/intervensi yang efektif, efisien dan dapat ditindaklanjuti selama tiga tahun ke depan (2017-2019). Laporan ini menyajikan hasil perhitungan biaya yang dilakukan pada awal tahun 2017 yang bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya untuk *peta jalan* tersebut.

Sumber daya yang termasuk dalam kajian ini terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu 1). komoditas dan persediaan kontrasepsi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat prevalensi kontrasepsi sebesar 66% pada tahun 2019, 2). biaya pelayanan, dan 3). sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan intervensi dan kegiatan yang dijabarkan pada *peta jalan* (pertemuan, lokakarya pelatihan, KIE/KPP, dan kegiatan pemantauan dan pengawasan). Data biaya ini dikumpulkan selama tahun 2016 melalui wawancara dan diskusi dengan FP2020 Indonesia Country Committee, Tim Koordinasi Nasional RFP, serta para ahli terkait dari Bappenas, BKKBN dan Kementerian Kesehatan, UNFPA dan USAID di Jakarta.

Kebutuhan komoditas kontrasepsi diproyeksikan mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan menggunakan model proyeksi FP2020, yang dimodifikasi untuk mencerminkan keadaan yang spesifik bagi Indonesia. Intervensi dan kegiatan spesifik yang terdapat di *road map* dihitung dengan menggunakan metodologi penetapan biaya berbasis aktivitas.

Total biaya untuk rencana selama 3 tahun diperkirakan sebesar 12,3 Triliun Rupiah atau 910 juta US Dollar dengan nilai tukar 13.500 Rupiah/ US Dollar. Dua pertiga dari biaya tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan pelayanan, sekitar 13% untuk menciptakan permintaan, 10% untuk tata kelola yang lebih baik dan sekitar 1% untuk berbagi pengetahuan. Grafik dan tabel berikut menunjukkan data secara rinci.

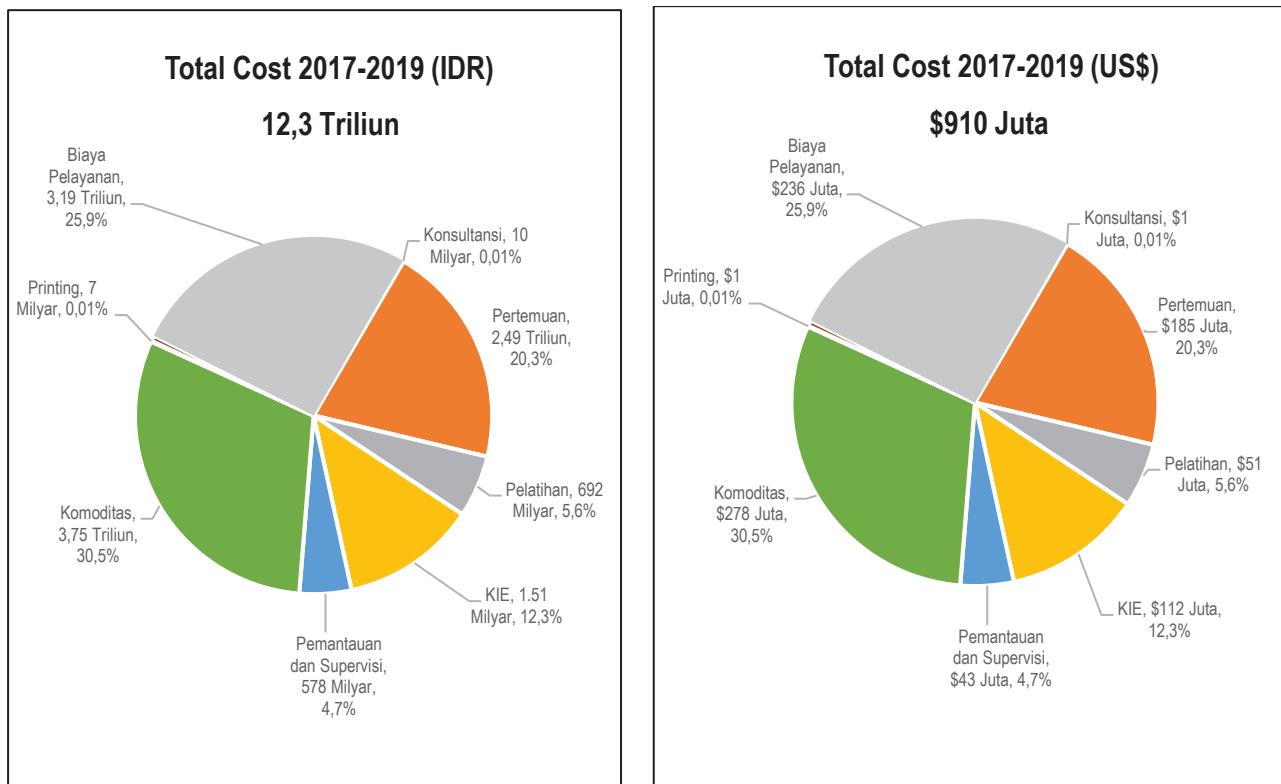
Gambar 1. Total Biaya untuk Tujuan Strategis



Tabel 1. Total Biaya Berdasarkan Tujuan Strategis

Tujuan Strategis	Biaya (Rupiah)	Biaya US\$	%
Tujuan Strategis 1: Tersedianya Sistem penyediaan pelayanan KB yang adil dan berkualitas di sektor publik dan swasta untuk memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan reproduksi mereka.	9,3 Triliun	688 Juta	75,5%
Tujuan Strategis 2: Meningkatnya permintaan atas metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan penggunaan yang berkelanjutan.	1,6 Triliun	118 Juta	13%
Tujuan Strategis 3: Meningkatnya bimbingan dan pengelolaan di seluruh jenjang pelayanan serta lingkungan yang mendukung untuk program KB yang efektif, adil, dan berkelanjutan pada sektor publik dan swasta untuk memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan-tujuan reproduksi mereka	1,3 Triliun	97 Juta	10,8%
Tujuan Strategis 4: Berkembang dan diaplikasikannya inovasi dan bukti untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, dan berbagi pengalaman melalui kerjasama Selatan-Selatan	102 Milyar	8 Juta	0,8 %
Total	12,3 Triliun	910 Juta	100%

Sekitar 25,9% dari total belanja diproyeksikan untuk biaya pelayanan, 30,5% untuk komoditas, 20,3% untuk pertemuan dan lokakarya, 12,3% untuk aktivitas KIE/KPP, 5,6% untuk pelatihan dan sebesar 4,7% untuk pengawasan.

Gambar 2. Total Biaya Berdasarkan Aktifitas

Rancangan biaya tersebut sebanding dengan rencana pelaksanaan FP2020 dari negara yang lain. Biaya rata-rata per tahun dari wanita usia subur adalah \$2,75, sesuai dengan biaya yang diperkirakan untuk negara lain yaitu sebesar \$2 - \$5. Tidak seperti perencanaan negara lain, perkiraan di Indonesia belum termasuk gaji petugas kesehatan. Tabel berikut menunjukkan kebutuhan sumber daya total berdasarkan tujuan strategis dan keluaran.

Tabel 2. Rencana Biaya Pelaksanaan di Indonesia Tahun 2017-2019 – Ringkasan Berdasar Keluaran

	Keluaran	Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)	Total (%)
Tujuan Strategis 1: Tersedianya Sistem penyediaan pelayanan KB yang adil dan berkualitas di sektor publik dan swasta untuk memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan reproduksi mereka.				
Keluaran 1.1	Meningkatnya ketersediaan pelayanan KB dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat memenuhi tujuan reproduksi mereka	3,8 Triliun	\$283 Juta	31,0%
Keluaran 1.2	Dimanfaatkannya sumber daya sektor swasta untuk pemerataan akses ke pelayanan KB berkualitas yang memperhatikan hak klien.	123 Milyar	\$9 Juta	1,0%
Keluaran 1.3	Meningkatnya Sistem Jaminan Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	4,1 Triliun	\$308 Juta	33,8%
Keluaran 1.4	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia untuk menyediakan pelayanan KB yang berkualitas	718 Milyar	\$53 Juta	5,8%
Keluaran 1.5	Diperkuatnya sistem informasi manajemen untuk menjamin kualitas, kelengkapan serta integrasi yang sejalan dengan sistem kesehatan.	308 Milyar	\$23 Juta	2,5%
Keluaran 1.6	Meningkatnya kualitas pelayanan KB yang memperhatikan hak klien dan mengintegrasikan pelayanan sepanjang kontinum siklus kesehatan reproduksi.	167 Milyar	\$12 Juta	1,4%
TOTAL Tujuan 1:		9,3 Triliun	\$688 Million	75,5%
Tujuan Strategis 2: Meningkatkan permintaan penggunaan metode kontrasepsi modern dengan penggunaan yang berkesinambungan.				
Keluaran 2.1	Tersedianya strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP/Behavior Change Communication) yang komprehensif	914 Milyar	\$68 Juta	7,4%
Keluaran 2.2	Meningkatnya keterlibatan tenaga kesehatan, kelompok perempuan, dan tokoh agama dalam menggerakkan dukungan untuk program KB serta mengatasi hambatan dalam berKB	504 Milyar	\$37 Juta	4,1%
Keluaran 2.3	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pemahaman tentang keluarga berencana	177 Milyar	\$13 Juta	1,4%
TOTAL Tujuan 2:		1,5 Triliun	\$118 Juta	13,0%
Tujuan Strategis 3: Meningkatkan bimbingan dan pengelolaan di seluruh jenjang pelayanan serta lingkungan yang mendukung untuk program KB yang efektif, adil, dan berkelanjutan pada sektor publik dan swasta untuk memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan-tujuan reproduksi mereka				
Keluaran 3.1	Meningkatnya kapasitas untuk penatalayanan/pengelolaan internal dan lintas institusi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk program yang efisien dan berkelanjutan.	493 Milyar	\$37 Juta	4,0%
Keluaran 3.2	Meningkatnya koordinasi dengan Kemenkes di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan kontribusi sistem kesehatan terhadap KB di berbagai tahap dalam siklus kesehatan reproduksi	341 Milyar	\$25 Juta	2,8%

Keluaran		Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)	Total (%)
Keluaran 3.3	Meningkatnya kepemimpinan dan kapasitas pejabat SKPD KB dan pejabat Kesehatan Kabupaten/kota untuk secara efektif mengelola program KB	236 Milyar	\$17 Juta	1,9%
Keluaran 3.4	Meningkatnya kapasitas untuk melakukan advokasi berbasis bukti di semua tingkat pemerintahan dan di masyarakat yang terfokus pada peran penting KB dalam mencapai tujuan pembangunan serta untuk meningkatkan visibilitas program KB dan sumberdayanya.	112 Milyar	\$8 Juta	0,9%
Keluaran 3.5	Meningkatnya kapasitas dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program KB dan menjamin pemerataan dan keberlanjutan program.	86 Milyar	\$6 Juta	0,7%
Keluaran 3.6	Adanya sistem akuntabilitas yang fungsional yang melibatkan masyarakat madani.	39 Milyar	\$3 Juta	0,3%
TOTAL Tujuan 3:		1,3 Triliun	\$97 Juta	10,6%
Tujuan Strategis 4: Berkembang dan diaplikasikannya inovasi dan bukti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, dan berbagi pengalaman melalui kerjasama Selatan-Selatan				
Keluaran 4.1	Praktek dan model terbaik tersedia untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan	70 Milyar	\$5 Juta	0,6%
Keluaran 4.2	Penelitian operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB diterapkan, dievaluasi, serta diperluas	31 Milyar	\$2 Juta	0,3%
TOTAL Tujuan 4:		102 Milyar	\$8 Juta	0,8%
TOTAL		12,3 Triliun	\$910 Juta	100,0%

II. Latarbelakang

Keluarga Berencana 2020 (FP2020) adalah sebuah kemitraan global yang mendukung hak perempuan dan anak perempuan untuk memutuskan secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, mengenai kapan, dan berapa banyak jumlah anak yang mereka inginkan. Tujuan FP2020 adalah untuk membuka kesempatan bagi 120 juta perempuan dan juga anak perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi pada tahun 2020. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah, masyarakat sipil, organisasi multicultural, donor, sektor swasta, dan peneliti serta komunitas pengembang bekerja bersama-sama untuk mengatasi hambatan di bidang kebijakan, pembiayaan, pemberian layanan, dan sosiokultur yang dialami perempuan dalam mengakses informasi, layanan dan persediaan kontrasepsi.

Pada pertemuan FP2020 tahun 2012, Indonesia menyampaikan komitmennya terhadap tujuan FP2020. Hal tersebut kemudian melatrbelakangi terbentuknya *FP2020 Indonesia Country Committe*, yang diketuai oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan melibatkan mitra-mitra pembangunan lain yaitu UNFPA dan USAID (yang digantikan oleh CAD Kanada pada tahun 2017) sebagai focal points, FP2020 Indonesia Country Committee juga didukung oleh kelompok kerja yang lebih kecil, yaitu 1) Kelompok Kerja Strategi KB, 2) Kelompok Kerja Hak dan Pemberdayaan, dan 3) Kelompok Kerja Data. Selama beberapa tahun terakhir, Kelompok Kerja Strategi KB mengembangkan kerangka kerja untuk strategi KB nasional berbasis hak, yang dibuat berdasarkan dokumen yang telah ada sebelumnya (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN, Perencanaan Strategis BKBBN dan Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan) untuk menjadi referensi dan panduan berbagai program dan sektor pemerintah serta organisasi non pemerintah (LSM) dan sektor swasta lainnya.

Strategi KB berbasis hak mengidentifikasi kebutuhan untuk memfokuskan kembali dan memposisikan ulang program KB nasional, serta memberi panduan secara menyeluruh dalam rangka perkuatan program nasional. Berdasarkan strategi yang dituangkan dalam dokumen tersebut, Indonesia mengembangkan *roadmap* (peta jalan) sebagai panduan pelaksana, yang menjabarkan aktivitas/intervensi yang efektif dan efisien serta dapat dilaksanakan, dan mengidentifikasi batas waktu dan menetapkan tolak ukur untuk digunakan oleh mitra pembangunan untuk memantau dan mendukung program KB nasional. Dokumen ini dimaksudkan untuk mendukung peta jalan tersebut, serta menguraikan biaya yang diperlukan.

III. Metodologi, Asumsi dan Sumber Daya

Sumber daya yang diperhitungkan pada penelitian ini dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 1). Biaya untuk komoditas kontrasepsi, 2). biaya pelayanan, dan 3). sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan intervensi dan kegiatan sesuai apa yang diuraikan dalam pelaksanaan peta jalan (pertemuan, lokakarya pelatihan, KIE/KPP, kegiatan pemantauan dan pengawasan). Data biaya dikumpulkan sejak tahun 2016 melalui wawancara dan diskusi dengan *FP2020 Indonesia Country Committee*, Tim Kordinasi Nasional RFP, dan juga para ahli dari Bappenas, BKKBN dan Kementerian Kesehatan, serta UNFPA dan USAID di Jakarta.

Kebutuhan komoditas kontrasepsi diproyeksikan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan model proyeksi FP2020, yang dimodifikasi sesuai dengan keadaan khusus yang ada di Indonesia. Jenis intervensi dan kegiatan khusus yang terdapat dalam pelaksanaan *roadmap* dihitung dengan menggunakan metodologi penetapan biaya berbasis aktivitas..

A. Komoditas Kontrasepsi

Biaya pengadaan dan pendistribusian komoditas dan persediaan kontrasepsi dihitung dengan menggunakan data dan target prevalensi kontrasepsi, serta biaya unit yang diberikan oleh BKKBN. Tingkat prevalensi kontrasepsi total saat ini pada wanita menikah mencapai 61,9% yang diasumsikan pada tahun 2016, terjadi peningkatan terhadap tujuan FP2020 yaitu sebesar 66,0%, dimana metode jangka panjang dihitung sebesar 23,5% dari semua metode yang digunakan di tahun terakhir. Metode kontrasepsi yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya komoditas didasarkan pada survey DHS pada tahun 2012 dan diperlihatkan pada diagram sebelah kanan.

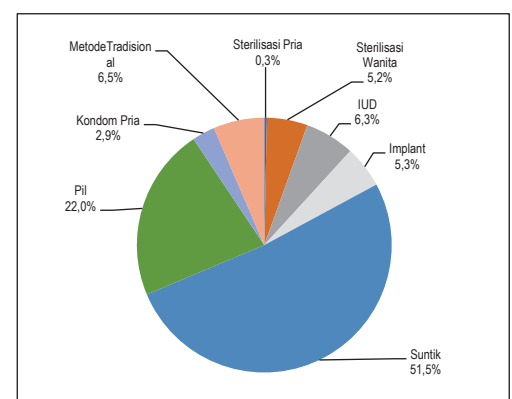


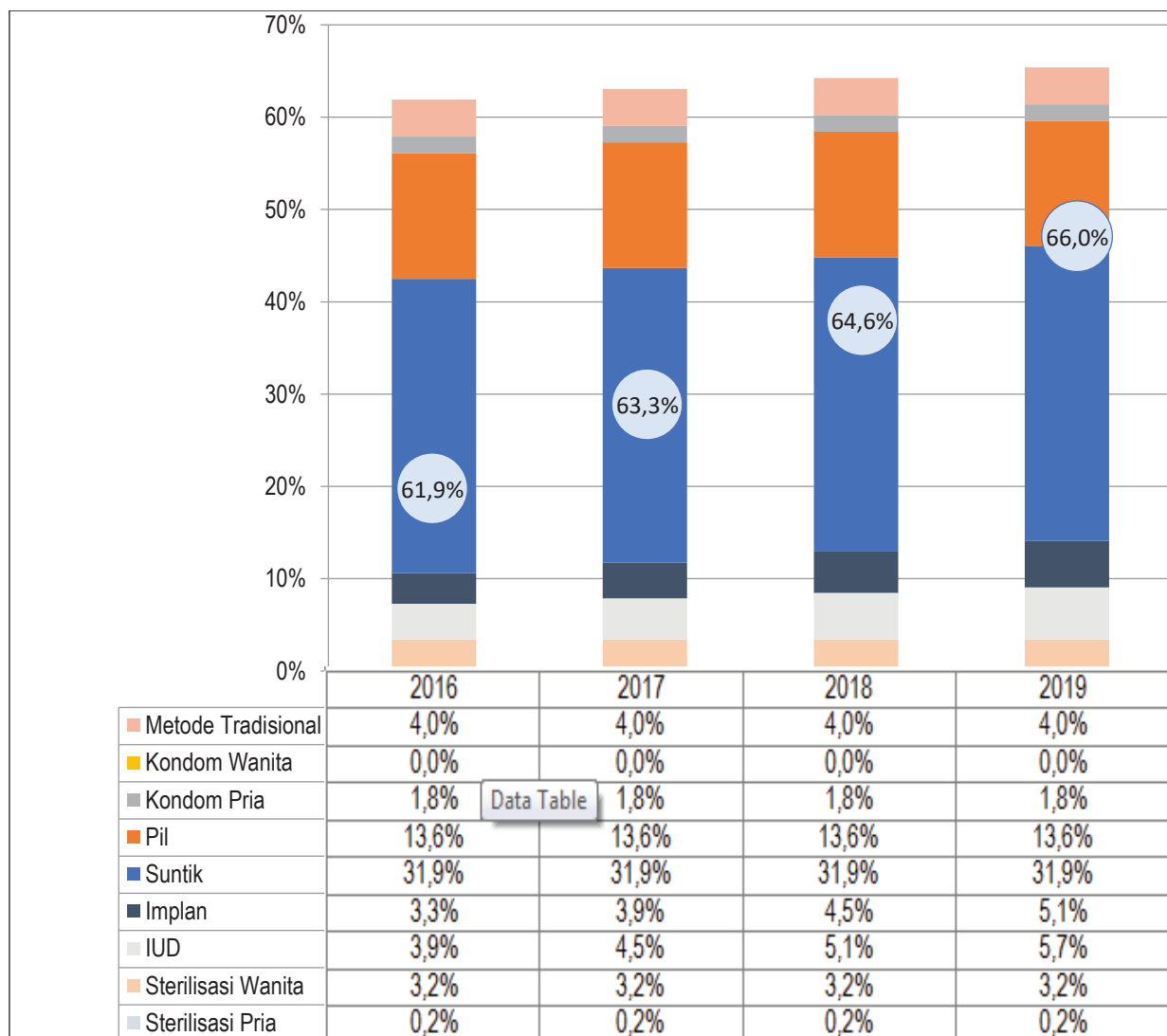
Table berikut ini menggambarkan asumsi khusus yang digunakan pada penghitungan, termasuk sumber datanya.

Tabel 3. Asumsi dan Sumber Data Untuk Proyeksi Keluarga Berencana

	Nilai	Sumber/ Keterangan
Wanita Usia Subur (WUS) (15-49):	69,2 Juta tahun 2015, meningkat menjadi 71,6 Juta tahun 2016.	<u>Total populasi:</u> Badan Pusat Statistik BPS) Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan) Penggunaan nilai 2015 dan 2020, interpolasi digunakan untuk nilai di tahun-tahun berikutnya. <u>Wanita usia 15-49:</u> Berdasar pada data BPS, wanita usia antara 15-49 mewakili sekitar 27% dari total populasi tersebut. Untuk nilai tahunan secara rinci lihat Tabel 1 di Bagian Hasil.
Prosentse Wanita Yang Sudah Menikah (%)	59,2%	Data 2015 digunakan setiap tahun (2016-2020) karena data hanya tersedia untuk tahun 2015. Website BPS, Juli 2016.
Wanita Menikah CPR dan Metode Campuran (2016):	61,9% in 2016	SDKI 2012.
Wanita Menikah CPR dan Metode Campuran (2019):	Berdasar pada tujuan FP2020 goal yaitu CPR 66%, modern CPR yaitu 62%	Asumsi bahwa keseluruhan CPR meningkat sebesar 4,1% akan menggunakan metode jangka panjang (50% untuk IUD, 50% untuk implan), untuk semua metode yang lainnya akan tetap sama (misalnya, pil 13,6% dari total pada tahun 2016 dan 2020). IUD berasal dari 3,9% sampai 6,0% Implan dari 3,3% sampai 5,4%
CYP per metod:	<u>Metoda Jangka-Pendek:</u> Pill: 13 siklus per CYP Suntik: 4 injeksi per CYP Kondom: 72 kondom per CYP <u>Metode Jangka Panjang:</u> Implan: 3,2 CYP IUD: 4,6 CYP Male and female sterilization: 13 CYP	Asumsi penggunaan metode jangka panjang berdasarkan model FP2020
Biaya Komoditas per Metode	<u>Metoda Jangka-Pendek:</u> Pill: Rp 2.200 per siklus Suntik: Rp. 6.500 per suntik Kondom: Rp. 400 per kondom <u>Metode Jangka Panjang:</u> Implan: Rp 250.000 IUD: Rp 18.895 Sterilisasi untuk Pria dan Wanita:	Standar biaya BKKBN tahun 2017
Obat-obatan lain dan perlengkapan yang dibutuhkan per methode	<u>Metoda Jangka-Pendek:</u> Pil: -- Suntik Rp 1.500 per suntik Kondom: -- <u>Metode Jangka Panjang:</u> Implan: Rp 46.500 IUD: Rp 8.100 Sterilisasi Pria dan Wanita masing-masing: Rp 23.000 and 65.000	Dihitung dengan menggunakan standar biaya UNFPA, standar harga yang diberikan oleh BKKBN serta dari Katalog Persediaan UNICEF Tahun 2016 karena ketidaktersediaan harga internasional untuk persediaan
Biaya transportasi untuk komoditas a) Dari Pusat ke Provinsi b) Dari Provinsi ke Kabupaten/Kota c) Dari Kabupaten/ Kota ke Fasilitas	Asumsi menjadi 40% a) 50% dari Total Biaya b) 25% c) 25%	Dihitung dengan asumsi lumpsum Standard Biaya Umum Kemenkeu

Grafik berikut menunjukkan prosentasi wanita menikah di Indonesia yang diproyeksikan dengan menggunakan metode kontrasepsi yang berbeda selama periode 2016-2019.

Gambar 3. Prosentase Wanita Menikah yang Menggunakan Metode Berbeda



B. Biaya Kegiatan

Intervensi dan kegiatan dalam perencanaan, didesain untuk meningkatkan kualitas dalam penyampaian pelayanan KB, serta menciptakan permintaan dan meningkatkan tata kelola dan adanya sharing/berbagi ilmu pengetahuan di antara mitra, yang dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis aktivitas, dan dari bawah ke atas (*bottom up*). Untuk setiap kegiatan, biaya unit ditentukan, yang kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang terlibat dalam aktivitas.

Biaya Pelayanan KB

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan menjelaskan bahwa Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh bidan atau dokter ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Standar Tarif Untuk Jasa Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana

Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan Keluarga Berencana	Permenkes 59/ 2014 (diundangkan 12 Sep 2014)	Permenkes 52/ 2016 (diundangkan 26 Okt 2016)
Pemeriksaan ANC	200.000	200.000
Persalinan pervaginam normal	600.000	700.000/800.000
Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000	950.000
Pemeriksaan PNC/ neonatus	25.000	25.000
Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000	175.000
Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000	125.000
Pemasangan/ pencabutan IUD/ implan	100.000	100.000
Pelayanan suntik KB	15.000	15.000
Penanganan komplikasi KB	125.000	125.000
Pelayanan KB MOP/ vasektomi	350.000	350.000
Jenis Pelayanan	Permenkes 69/ 2013 dan INA-CBG 2013	
Pil di FKTP	15.000	
Kondom di FKTP	15.000	
Pil di FKTL	167.500	
Kondom di FKTL	167.500	
Injeksi di FKTL	167.500	
Pelayanan implan di FKTL	172.600	
Pelayanan IUD di FKTL	372.400	
Pelayanan MOW di FKTL	816.500	

Jenis pelayanan tambahan dalam Permenkes 69/ 2013 dan INA-CBG 2013 disarikan dari laporan penelitian pelayanan kontrasepsi dalam sistem pelayanan kesehatan di era JKN (Wilopo, 2013) yang kemudian akan diasumsikan naik 5% per tahun untuk pelayanan di FKTL karena pelayanan di FKTP cenderung tetap dari kedua standar tarif Permenkes, kecuali jasa pelayanan untuk persalinan. Walaupun demikian, dalam laporan ini akan memfokuskan pada pelayanan di FKTP dengan mengacu pada Permenkes 52/ 2016. Dengan mempertimbangkan beberapa asumsi seperti :

1. Peserta KB aktif dan KB baru untuk KB suntik rutin menerima pelayanan setiap 3 bulan karena yang ditanggung oleh JKN adalah KB suntik 3 bulan
2. Seluruh pelayanan KB diklaimkan melalui mekanisme non kapitasi
3. Rerata kenaikan pemanfaatan pelayanan KB sebesar 0,5% setiap tahun

4. Estimasi jasa pelayanan bisa lebih tinggi karena tidak seluruh pelayanan KB dihitung dalam perhitungan estimasi

Biaya Unit

Tabel berikut menunjukkan biaya unit yang paling umum seperti per diem, biaya perjalanan, dan lain-lain yang digunakan serta sumber biaya unit itu sendiri.

Tabel 5. Biaya Unit yang Digunakan di Dalam Pembiayaan Kegiatan dalam CIP

Item	Biaya Unit (Rupiah)	Biaya Unit (US\$)	Satuan	Sumber Daya/ Keterangan
Konsultan	1.700.000	\$125,93	Per Hari	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Snack Pagi/ Sore (Provinsi/Kab./ Kota)	63.000	\$4,67	Per Orang Per Hari	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Snacks Pagi/ Sore Pusat)	100.000	\$7,41	Per Orang Per Hari	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
ATK Pertemuan (bolpoint, blocknote, fotocopy)	20.000	\$1,48	Per Orang	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
ATK Training (bolpoint, blocknote, fotocopy) - Training	35.000	\$2,59	Per Orang	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan Kementerian Kesehatan
Perlengkapan untuk Pelatihan Klinis	500.000	\$37,04		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan Kementerian Kesehatan
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	\$11,11		Dokumen Anggaran Kab./ Kota (Kab. Malang, 2017), Kegiatan Kementerian Kesehatan
Transport Lokal (Pusat)	150.000	\$11,11		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan Kementerian Kesehatan
Sewa Ruang (Kab./ Kota)	2.500.000	\$185,19		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang , Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 2017
Sewa Ruang (Pusat)	2.500.000	\$185,19		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, Kegiatan Kementerian Kesehatan
Paket Pertemuan (Pusat, level tinggi)	500.000	\$37,04	Per Orang	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa Ruang, Makan Siang, dan snack 2x
Paket Pertemuan (Pusat, rutin)	330.000	\$24,44	Per Orang	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa Ruang, Makan Siang, dan snack 2x
Paket Pertemuan full board (Pusat, regular)	715.000	\$52,96	Per Orang	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa Ruang, Makan Siang, dan snack 2x + makan malam
Paket Pertemuan (Provinsi)	250.000	\$18,52	Per Orang	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, termasuk Sewa Ruang, Makan Siang, dan snack 2x
Paket Pertemuan (Kab./ Kota)	150.000	\$11,11	Per Orang	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017, Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 2017, termasuk Sewa Ruang, Makan Siang, dan snack 2x
Honorarium Pembicara Utama (Pusat)	1.100.000	\$81,48	per tatap muka	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, untuk Eselon 1, Kegiatan di Kementerian Kesehatan

Item	Biaya Unit (Rupiah)	Biaya Unit (US\$)	Satuan	Sumber Daya/ Keterangan
Honorarium Pembicara Utama (Provinsi)	1.000.000	\$74,07	per tatap muka	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, for Echelon 1, Kegiatan di Kementerian Kesehatan Tahun 2017
Honorarium Pembicara Utama (Kab./ Kota)	500.000	\$37,04	per tatap muka	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 2017
Honorarium Moderator	700.000	\$51,85	per kegiatan	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Honorarium Facilitator/Trainer (Sesi)	300.000	\$22,22	per sesi (45 min)	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Honorarium Narasumber (Sesi)	600.000	\$44,44	per sesi (45 min)	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Honorarium Pelatih Utaman (Sesi)	1.000.000	\$74,07	per sesi (45 min)	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Notulen	300.000	\$22,22		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
DSA (Pusat)	980.000	\$72,59		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
DSA (Provinsi)	980.000	\$72,59		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
DSA (Kab./ Kota)	980.000	\$72,59		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 2017
DSA untuk Makan (Kab./ Kota)	100.000	\$7,41		Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu
Per Diem (Full Board, Dalam Kota)	115.000	\$8,52		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi)	4.000.000	\$296,30	Rata-rata	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Tiket Pesawat (Dalam Provinsi)	1.000.000	\$74,07		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Terminal	330.000	\$24,44		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Sewa Kendaraan	700.000	\$51,85	Per Hari	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Perwal No 960 Th 2015 ttg Standar Biaya 2016 Kota Palu, Perbup No 63 Th 2016 ttg Standar Satuan Harga di Lingkungan Kab. Cilacap Tahun 2017
Print+ Biaya Distribusi	675	\$0,05	Per Halaman	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Biaya Desain	6.750	\$0,50	Per Halaman	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Perjalanan dari Provinsi ke Kab./ Kota	370.000	\$27,41		PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Umum 2017
Biaya Bensin/ Solar (per km)	1.000	\$0,07	per km	Assuming fuel efficiency of 10 km per liter
Pertemuan 1	4.890.000	\$362		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pertemuan 2	7.500.000	\$556		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pertemuan 3	28.920.000	\$2.142		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pertemuan 4	8.100.000	\$600		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pertemuan 5	21.180.000	\$1.569		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pertemuan 6	37.700.000	\$2.793		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pertemuan 7	220.700.000	\$16.348		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pelatihan 1	51.425.000	\$3.809		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pelatihan 2	68.185.000	\$5.051		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya

Item	Biaya Unit (Rupiah)	Biaya Unit (US\$)	Satuan	Sumber Daya/ Keterangan
Pelatihan 3	43.905.000	\$3.252		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pelatihan 4	159.625.000	\$11.824		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Pelatihan 5	46.425.000	\$3.439		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Kunjungan Supervisi 1	27.640.000	\$2.047		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Kunjungan Supervisi 2	13.960.000	\$1.034		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Kunjungan Supervisi 3	1.350.000	\$100		Lihat Lebih Detail Pada Perhitungan Biaya
Print+ Biaya Distribusi	675	\$0,05	Per halaman	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Kegiatan Kementerian Kesehatan Tahun 2017
Desain	6.750	\$0,50	Per halaman	PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016, Kegiatan Kementerian Kesehatan Tahun 2017
Tingkat Nasional – Media Promosi	4.000.000.000	\$296.296		
Tingkat Provinsi – Media Promosi	1.000.000.000	\$74.074		
Tingkat Desa – Media Promosi	100.000.000	\$7.407		

Tiket Penerbangan Antara Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi

Rata-rata tariff penerbangan antara Jakarta dan provinsi berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan tahun 2016. Perbedaan tarif penerbangan dirata-ratakan untuk menghasilkan tariff penerbangan rata-rata, yaitu sebesar Rp. 4,1 juta, yang digunakan untuk semua proyeksi.

Tabel 6. Tiket Pesawat Dari Jakarta Ke Beberapa Kab./ Kota

Destination	IDR	US\$
Ambon	7.081.000	524,52
Balikpapan	3.797.000	281,26
Banda Aceh	4.492.000	332,74
Bandar Lampung	1.583.000	117,26
Banjarmasin	2.995.000	221,85
Batam	2.888.000	213,93
Bengkulu	2.621.000	194,15
Biak	7.519.000	556,96
Denpasar	3.262.000	241,63
Gorontalo	4.824.000	357,33
Jambi	2.460.000	182,22
Jayapura	8.193.000	606,89
Yogyakarta	2.268.000	168,00
Kendari	4.182.000	309,78
Kupang	5.081.000	376,37
Makassar	3.829.000	283,63
Malang	2.695.000	199,63
Mamuju	4.867.000	360,52
Manado	5.102.000	377,93
Manokwari	10.824.000	801,78
Mataram	3.230.000	239,26
Medan	3.808.000	282,07
Padang	2.952.000	218,67
Palangkaraya	2.984.000	221,04
Palembang	2.268.000	168,00
Palu	5.113.000	378,74
Pangkal Pinang	2.139.000	158,44
Pekanbaru	3.016.000	223,41
Pontianak	2.781.000	206,00
Semarang	2.182.000	161,63
Solo	2.342.000	173,48
Surabaya	2.674.000	198,07
Ternate	6.664.000	493,63
Timika	7.487.000	554,59

Sumber: PERMENKEU No. 33/2016

Facilities Health and Staff Health

The following table shows the number of hospitals, Puskesmas and health workers used in the cost setting.

Tabel 7. Jumlah Provinsi, Number of Provinces, Kab./ Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan Staf Kesehatan

	Number	Source
Provinsi	34	Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri
Kab./ Kota	514	Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri
Rumah Sakit	1.593	Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015, Kementerian Kesehatan, http://sirs.yankes.kemkes.go.id/rsonline/report/
Puskesmas	9.754	Jumlah Puskesmas Tahun 2015, Kementerian Kesehatan
SKPD KB	514	Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri
Dinas Kesehatan	514	Profil Kab./ Kota Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri
Posyandu	289.635	Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan
RS Pemerintah	11.347	Facilities Health tahun 2015, Kementerian Kesehatan
Dokter	94.747	Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan
Perawat	288.405	Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan
Bidan	137.110	Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Kesehatan
Petugas Lapangan KB	15.777	Website BKKBN Tahun 2017

Source: Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPS Indonesia, 2017

Meeting

Because of the large number of meetings that are planned (around 90,000 at the center, province, kabupaten and facilities), the meeting is not counted individually, but in a group, which is grouped into 7 groups, so that each group can be given an average cost. The main factor that is identified because it affects the meeting cost is

- Whether the meeting will be held in one of the offices of the Ministry or BKKBN or hotel. This affects the cost because holding a meeting in a hotel requires a cost that is much higher (because the need to pay for rental space and session snack or food which is more expensive)
- At what level the meeting will be held (center, province, kabupaten)
This mainly affects the cost of the venue, travel cost, per diem, and others.
- Whether there are other things that cause an increase in cost? For example, participants from other areas (for example, participants from other provinces to Jakarta to participate in a meeting, for experts/staff at the center, come to the province to assist in the sensitization meeting), the meeting requires a source or moderator who needs to be paid.

The following table shows the main characteristics of different types of meetings. Meeting 1-3 is held at the kabupaten and province level, meeting 4-7 is held at the center level

Tabel 8. Tipe Pertemuan yang Dipertimbangkan dalam Penghitungan

Pertemuan	Contoh	Di Tingkat Mana?	Di Kantor atau Hotel?	Detail Biaya Tambahan?
Pertemuan 1:	Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (di Kantor Kab./ Kota)	Kab./ Kota/Provinsi	Kantor	--
Pertemuan 2:	Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (di Hotel)	Kab./ Kota/Provinsi	Hotel	--
Pertemuan 3:	Sensitization Pertemuan	Provinsi	Hotel	2 peserta dari tingkat Pusat (perjalanan +DSA)
Pertemuan 4:	Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Tingkat Pusat-Kantor)	Pusat	kantor	--
Pertemuan 5:	Tingkat Pertemuan workshop/stakeholder di Hotel	Pusat	Hotel	Honorarium untuk 4 Narasumber
Pertemuan 6:	Pertemuan tingkat Pusat, banyak peserta, tingkat tinggi Pertemuan	Pusat	Hotel	Honorarium untuk 4 Narasumber, biaya hotel
Pertemuan 7:	Pusat-level Pertemuan with large number of provincial participants	Pusat	Hotel	Biaya perjalanan, akomodasi dan lumpsum karena peserta dari provinsi

Tabel berikut ini menunjukkan asumsi biaya pertemuan secara lebih rinci.

Tabel 9. Pertemuan 1: Pertemuan Tingkat Provinsi-/Kab./ Kota – Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (di Kantor Provinsi/Kab./ Kota)

Peserta	30			
Hari	1			
Pembicara Utama	0			
Narasumber	0			
Moderator	0			
	Biaya Unit	Unit	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Snacks (Provinsi/Kab./ Kota)	63.000	30	1.890.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	20	3.000.000	
TOTAL			4.890.000	\$362

Asumsi:

- Pertemuan setengah hari atau sehari penuh
- Pertemuan yang diasumsikan berada di kantor Kemenkes atau BKKBN tingkat provinsi atau kabupaten
- Rata-rata sebanyak 30 peserta
- Setiap peserta mendapatkan dana penyegaran (Rp. 25.000)
- Hanya staff Kemenkes (diasumsikan , rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat biaya perjalanan lokal

Tabel 10. Pertemuan 2: Pertemuan Tingkat Provinsi-/Kab./ Kota - (di Hotel)

Peserta	30			
Hari	1			
Pembicara Utama	0			
Narasumber	0			
Moderator	0			
	Biaya Unit	Unit	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Kab./ Kota)	150.000	30	4.500.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	20	3.000.000	
TOTAL			7.500.000	\$556

Asumsi:

- Pertemuan sehari penuh.
- Rata-rata sebanyak 30 peserta
- Pertemuan diasumsikan berada di hotel (di tingkat provinsi atau kabupaten) dengan biaya per peserta sebesar Rp. 150.000 (termasuk ruang pertemuan, makan siang, penyegaran di siang dan sore hari)
- Hanya staff Kemenkes (diasumsikan, rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat biaya perjalanan lokal

Tabel 11. Pertemuan 3: Pertemuan Tingkat Provinsi - Workshop (di Hotel)

Peserta	30			
Hari	1			
Pembicara Utama	1			
Narasumber	2			
Moderator	1			
	Biaya Unit	Unit	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Provinsi)	250.000	34	8.500.000	
Honorarium Pembicara Utama (Provinsi)	1.000.000	1	1.000.000	
Honorarium Narasumber (Session)	600.000	4	2.400.000	
Honorarium Moderator	700.000	1	700.000	
Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi)	4.000.000	2	8.000.000	
Terminal	330.000	2	660.000	
DSA (Provinsi)	980.000	2	1.960.000	
ATK Pertemuan (Pena, Perlengkapan, Foto Copy)	20.000	30	600.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	34	5.100.000	
TOTAL			28.920.000	\$2.142

Asumsi:

- Pertemuan sehari penuh
- Pertemuan diasumsikan berada di hotel tingkat provinsi dengan biaya per peserta sebesar Rp. 250.000 (termasuk ruang pertemuan, makan siang, penyegaran di siang dan sore hari)
- Rata-rata peserta sebanyak 30 orang, ditambah satu pembicara utama, dua narasumber dan 1 moderator
- Dua narasumber diasumsikan berasal dari tingkat pusat (mereka memerlukan tariff penerbangan ke provinsi, menerima DSA untuk satu hari (sebesar Rp. 800.000 untuk tingkat provinsi) dan penggantian terminal sebesar Rp. 500.000. Mereka juga akan mendapatkan honorarium tiap dua sesi.
- Dari peserta local, hanya staff Kemenkes (diasumsikan, rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat biaya perjalanan local

Tabel 12. Pertemuan 4: Pertemuan Tingkat Pusat - Pertemuan Kelompok Kerja (di Kantor BKKBN atau Kemenkes)

Peserta	30			
Hari	1			
Pembicara Utama	0			
Narasumber	0			
Moderator	0			
Notulen	0			
	Biaya Unit	Unit	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Snacks (Pusat)	100.000	30	3.000.000	
ATK Pertemuan (Pena, Perlengkapan, Foto Copy)	20.000	30	600.000	
Transport Lokal (Pusat)	150.000	30	4.500.000	
TOTAL			8.100.000	\$600

Asumsi:

- Pertemuan sehari penuh
- Pertemuan bertempat di kantor KemenKes atau BKKBN
- Rata-rata sebanyak 30 peserta
- Setiap peserta mendapatkan biaya penyegaran (Rp 25.000)
- ATK (fotokopi, alat tulis, bolpen) setiap peserta (Rp. 20.000)
- Dari peserta local, hanya staff Kemenkes (diasumsikan, rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat transport lokal.

Tabel 13. Pertemuan 5: Pertemuan Tingkat Pusat - Workshop/Stakeholder (di Hotel)

Peserta	30			
Hari	1			
Pembicara Utama	1			
Narasumber	4			
Moderator	1			
	Biaya Unit	Unit	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Pusat, regular)	330.000	36	11.880.000	
Honorarium Pembicara Utama (Pusat)	1.100.000	1	1.100.000	
Honorarium Narasumber (Session)	600.000	4	2.400.000	
Honorarium Moderator	700.000	1	700.000	
ATK Pertemuan (Pena, Perlengkapan, Foto Copy)	20.000	30	600.000	
Transport Lokal (Pusat)	150.000	30	4.500.000	
TOTAL			21.180.000	\$1.569

Asumsi:

- Pertemuan sehari penuh
- Pertemuan dilakukan di hotel di Jakarta dengan kisaran harga Rp. 350.000 tiap peserta (termasuk ruangan, makan siang dan penyegaran pagi dan sore hari.
- 4 narasumber, setiap orang memimpin satu sesi

- ATK (fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000
- Hanya staff KemenKes (diasumsikan, rata-rata, 20 dari 30 peserta) yang mendapat transport lokal.

Tabel 14. Pertemuan 6: Pusat Level, High-level Pertemuan (50 people, local participants)

Peserta	50			
Hari	1			
Pembicara Utama	1			
Narasumber	4			
Moderator	1			
	Biaya Unit	Unit	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Pusat, high level)	500.000	50	25.000.000	
Honorarium Pembicara Utama (Pusat)	1.100.000	1	1.100.000	
Honorarium Narasumber (Session)	600.000	4	2.400.000	
Honorarium Moderator	700.000	1	700.000	
ATK Pertemuan (pena, Perlengkapan, Foto Copy)	20.000	50	1.000.000	
Transport Lokal (Pusat)	150.000	50	7.500.000	
TOTAL			37.700.000	\$2.793

Asumsi:

- Pertemuan sehari penuh
- Pertemuan yang lebih besar dan lebih tinggi daripada Pertemuan ke 5
- Pertemuan dilakukan di hotel bintang 4 di Jakarta dengan kisaran biaya tiap peserta sebesar Rp. 500.000 (termasuk ruangan, makan siang dan penyegaran sore hari)
- Rata-rata peserta 50 orang, ditambah satu moderator, dan 4 narasumber (semua berasal dari Jakarta)
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000
- Hanya staff KemenKes (diasumsikan, rata-rata, 50 dari setengah peserta) yang mendapat transport lokal.

Tabel 15. Pertemuan 7: Pertemuan Tingkat Pusat (50 peserta, 34 dari Provinsi)

Peserta (Pusat)	16			
Peserta (Provinsi)	34			
Hari	1			
Pembicara Utama	1			
Narasumber (Session)	3			
Moderator	1			
Notulen	0			
	Biaya Unit	Unit	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Pusat, high level)	500.000	50	25.000.000	
Honorarium Pembicara Utama (Pusat)	1.100.000	1	1.100.000	
Honorarium Narasumber (Session)	600.000	3	1.800.000	
Honorarium Moderator	700.000	1	700.000	
Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi)	4.000.000	30	120.000.000	
Terminal	330.000	30	9.900.000	
DSA (Pusat)	980.000	60	58.800.000	
ATK (pena, Perlengkapan, Foto Copy) - Pertemuan	20.000	50	1.000.000	
Transport Lokal (Pusat)	150.000	16	2.400.000	
TOTAL			220.700.000	\$16.348

Asumsi:

- Pertemuan sehari penuh
- Pertemuan tingkat tinggi di tingkat pusat (di Jakarta) dengan jumlah peserta yang besar, yang berasal dari tingkat provinsi
- Pertemuan dilakukan di hotel bintang 4 di Jakarta dengan kisaran biaya tiap peserta sebesar Rp. 500.000 (termasuk ruangan, makan siang dan penyegaran sore hari)

- Rata-rata, 50 peserta (34 orang, tiap seorang berasal dari satu provinsi) ditambah 16 peserta dari Jakarta, ditambah satu moderator, 4 narasumber
- Tiga puluh empat peserta yang berasal dari provinsi memerlukan tariff penerbangan sebesar Rp 4juta, menerima DSA tiap satu hari (Rp. 900.000) dan penggantian terminal sebesar Rp. 330.000
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000
- Dari peserta lokal, hanya staff Kemenkes (diasumsikan dari rata-rata, setengah dari 16 peserta lokal) menerima transport local.

Jumlah Pertemuan

Untuk setiap pertemuan, perkiraan dibuat dengan berapa kali pertemuan tersebut akan terjadi. Pertemuan teknis yang meninjau pedoman baru di tingkat pusat, misalnya, diperkirakan berlangsung rata-rata sebanyak 3 kali. Untuk rapat sensitisasi, 2 pertemuan diasumsikan berlangsung di setiap tingkat (pusat, provinsi dan kabupaten). Semua pertemuan yang direncanakan di tingkat provinsi diasumsikan terjadi di setiap 34 provinsi, sehingga biaya dihitung untuk 34 pertemuan provinsi ini. Rapat yang direncanakan di tingkat kabupaten diasumsikan berlangsung di seluruh 514 kabupaten. Untuk pertemuan tingkat fasilitas atau komunitas, diasumsikan bahwa akan ada 2000 pertemuan (sekitar 4 di setiap kabupaten/ kota).

Dengan menggunakan pendekatan ini, diperkirakan akan ada lebih dari 93.000 pertemuan dengan biaya Rp 1,94 Milyar (US\$ 184 Juta).

Pelatihan

Seperti halnya dengan pertemuan, lokakarya pelatihan dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan.

- Pelatihan 1-3 *Training of Trainer* – (ToT) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten
- Pelatihan 4, pelatihan aktual – ketrampilan klinis
- Pelatihan 5, pelatihan aktual – manajemen

Tabel 16. Pelatihan 1: ToT di Tingkat Pusat

Peserta	25				
Hari	5				
Pembicara Utama	1				
Narasumber/Fasilitator	2				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan full board (Pusat, reguler)	715.000	27	5	96.525.000	
Honorarium Pembicara Utama (Pusat)	1.100.000	1	2	2.200.000	
Honorarium Narasumber (Sesi)	600.000	4	5	12.000.000	
Per Diem (Full Board, Dalam Kota)	115.000	28	5	16.100.000	
ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto Copy)	35.000	25	1	875.000	
Transport Lokal (Pusat)	150.000	27	5	20.250.000	
TOTAL				51.425.000	\$3.809

Asumsi:

- Pertemuan *Training of Trainer* (ToT) di tingkat pusat, selama 5 lima hari
- Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel di Jakarta dengan perkiraan biaya Rp. 300.000 tiap peserta (biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan penyegaran di pagi dan sore hari)
- Dua puluh lima peserta dan 2 fasilitator
- Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap hari (total 20 sesi, Rp 600.000 per sesi)
- Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama yang berasal dari tingkat pusat (Rp. 1,1 juta per kedatangan)
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000
- Biaya transportasi lokal untuk peserta dan fasilitator

Tabel 17. Pelatihan 2: ToT di Tingkat Provinsi

Peserta	25				
Hari	5				
Pembicara Utama	1				
Narasumber/Fasilitator	2				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Provinsi)	250.000	27	5	33.750.000	
Honorarium Pembicara Utama (Provinsi)	1.000.000	1	2	2.000.000	
Honorarium Narasumber (Session)	600.000	4	5	12.000.000	
Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi)	4.000.000	2	1	8.000.000	
Terminal	330.000	2	1	660.000	
DSA (Provinsi)	980.000	2	5	9.800.000	
Per Diem (Fullboard, Dalam Kota)	115.000	28	5	16.100.000	
ATK Pertemuan (pena, Perlengkapan, Foto Copy)	35.000	25	1	875.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	25	5	18.750.000	
TOTAL				68.185.000	\$5.051

Asumsi:

- Pertemuan *Training of Trainer (ToT)* di tingkat provinsi, selama 5 lima hari
- Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel dengan perkiraan biaya Rp. 250.000 tiap peserta (biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan penyegaran di pagi dan sore hari)
- Dua puluh lima peserta dan 2 fasilitator
- Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap hari (total 20 sesi, Rp 600.000 per sesi)
- Dua fasilitator berasal dari tingkat pusat dan memerlukan tariff penerbangan (Rp. 4 juta), DSA (Rp. 800.000 dikali 5 hari) dan biaya terminal (Rp. 500.000)
- Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama yang berasal dari tingkat provinsi (Rp. 1,4 juta per kedatangan)
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000
- Biaya transport lokal untuk peserta.

Tabel 18. Pelatihan 3: ToT di Tingkat Kabupaten/ Kota

Peserta	25				
Hari	5				
Pembicara Utama	1				
Narasumber/Fasilitator	2				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Provinsi)	250.000	27	5	33.750.000	
Honorarium Pembicara Utama (Kab./ Kota)	500.000	1	2	1.000.000	
Honorarium Narasumber (Session)	600.000	4	5	12.000.000	
Perjalanan dari Provinsi ke Kab./ Kota	370.000	2	2	1.480.000	
DSA (Kab./ Kota)	980.000	2	5	9.800.000	
ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto Copy)	35.000	25	1	875.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	25	5	18.750.000	
TOTAL				43.905.000	\$3.252

Asumsi:

- Pertemuan *Training of Trainer (ToT)* di tingkat kabupaten, selama 5 lima hari
- Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel dengan perkiraan biaya Rp. 250.000 tiap peserta (biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan snack di pagi dan sore hari)
- 25 peserta dan 2 fasilitator
- Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap hari (total 20 sesi, Rp 600.000 per sesi)
- 2 fasilitator berasal dari tingkat provinsi dan memerlukan biaya perjalanan (2x Rp. 370.000), DSA (Rp. 800.000 dikali 5 hari)
- Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama yang berasal dari tingkat provinsi (Rp. 500.000 per kedatangan)
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000
- Biaya transport lokal untuk peserta

Tabel 19. Pelatihan 4: Pelatihan Klinis di Tingkat Provinsi (Penyedia Layanan Kesehatan dan lainnya)

Peserta	15				
Hari	5				
SesiPer Hari	8				
Pembicara Utama	1				
Narasumber/ Fasilitator	4				
Pelatih Utama	1				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Provinsi)	250.000	20	5	25.000.000	
Honorarium Pembicara Utama (Provinsi)	1.000.000	1	2	2.000.000	
Honorarium Fasilitator/ Pelatih (Sesi)	300.000	8	5	12.000.000	
Honorarium Pelatih Utama (Sei)	1.000.000	1	5	5.000.000	
Tiket Pesawat (Dalam Provinsi)	1.000.000	15	1	15.000.000	
DSA (Provinsi)	980.000	20	6	117.600.000	
ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto Copy)	35.000	15	1	525.000	
Perlengkapan Pelatihan Klinis	500.000	15	1	7.500.000	
TOTAL				159.625.000	\$11.824

Asumsi:

- Loka karya pelatihan di tingkat provinsi, mengajarkan keterampilan klinis pada petugas kesehatan, yang berlangsung selama 5 hari
- Loka karya diasumsikan bertempat di sebuah hotel dengan perkiraan biaya Rp. 150.000 tiap peserta (biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang dan snack di pagi dan sore hari)
- 15 peserta 4 fasilitator dan 1 pelatih, yang semuanya menginap di hptel dan menerima DSA selama 5+1 hari
- Pelatih dan 4 fasilitator berasal dari tingkat pusat dan memerlukan biaya perjalanan (5x Rp 1 juta) dan DSA (5x Rp. 980.000) dikali 5 hari
- Ada 4 sesi dalam sehari yang dipimpin oleh sepasang fasilitator (total 40 sesi, Rp. 600.000 per sesi)
- Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama dari kabupaten (Rp. 500.000 per kedatangan)
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 35.000

Tabel 20. Pelatihan 5: Pelatihan di Tingkat Kabupaten/ Kota (Manajemen)

Peserta	25				
Hari	5				
Pembicara Utama	1				
Narasumber/Fasilitator	2				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Paket Pertemuan (Kabupaten/ Kota)	150.000	27	5	20.250.000	
Honorarium Pembicara Utama (Kab./ Kota)	500.000	1	2	1.000.000	
Honorarium Narasumber (Sesi)	600.000	4	5	12.000.000	
Tiket Pesawat (Dalam Provinsi)	1.000.000	2	2	4.000.000	
DSA (Kab./ Kota)	980.000	2	5	9.800.000	
ATK Pelatihan (pena, Perlengkapan, Foto Copy)	35.000	25	1	875.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	25	5	18.750.000	
TOTAL				46.425.000	\$3.439

Asumsi:

- Lokakarya pelatihan di tingkat kabupaten untuk pimpinan (manajer), staff logistic, pemimpin anak muda dan lain lain di tingkat kabupaten atau fasilitas, berlangsung selama 5 hari
- Loka karya dilaksanakan di hotel, dengan biaya sebesar Rp. 250.000 tiap peserta (biaya tersebut termasuk sewa ruang pertemuan, makan siang, snack di pagi dan sore hari)
- 25 peserta dan 2 fasilitator

- Tiap fasilitator memimpin 2 sesi setiap harinya (total 20 sesi, Rp. 600.000 tiap sesi)
- 2 fasilitator berasal dari tingkat provinsi dan memerlukan biaya perjalanan (2x Rp. 1 juta), DSA (2x Rp. 980.000, dikali 5 hari)
- Pertemuan dibuka dan ditutup oleh pembicara utama dari tingkat kabupaten (Rp. 500.000 per kedatangan)
- ATK fotokopi, alat tulis dan pena) tiap peserta Rp. 35.000
- Biaya transportasi local untuk peserta (Rp. 150.000 dikali 5 hari)

Pemantauan dan Pengawasan

Kunjungan pemantuan dan pengawasan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

- Supervisi 1, supervise/ pengawasan dari tingkat pusat ke tingkat provinsi
- Supervisi 2, supervise dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten
- Supervisi 3, supervise dari tingkat kabupaten ke tingkat kabupaten

Tabel berikut ini menjabarkan mengenai asumsi yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata perjalanan untuk kegiatan pemantauan.

Tabel 21. Kunjungan Supervisi dan Pertemuan (dari Pusat ke Provinsi)

Supervisor/Narasumber	2				
Hari	3				
Peserta Pertemuan	25				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Tiket Pesawat (Pusat ke Provinsi)	4.000.000	2	1	8.000.000	
Terminal	330.000	2	1	660.000	
DSA (Provinsi)	980.000	2	3	5.880.000	
Car rental	700.000	1	3	2.100.000	
Paket Pertemuan (Provinsi)	250.000	27	1	6.750.000	
ATK Pertemuan (pena, Perlengkapan, Foto Copy)	20.000	25	1	500.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	25	1	3.750.000	
TOTAL				27.640.000	\$2.047

Asumsi:

- Kunjungan pengawasan berlangsung selama 3 hari termasuk pertemuan akhir
- Ada 2 pengawas yang diasumsikan datang dari tingkat pusat dan memerlukan biaya perjalanan sebesar (2x Rp 4 juta) dan DSA (Rp. 980.000 dikali 3 hari)
- Pengawas menyewa kendaraan selama 3 hari, dengannbiaya sebesar Rp 700.000 per hari
- Pengawas akan mengunjungi 2 fasilitas setiap harinya dengan rata-rata 6 kali per kunjungan pengawasan
- Akan dilakukan pertemuan di akhir kunjungan pengawasan, yang akan dihadiri oleh 25 peserta
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000
- Biaya transportasi local untuk peserta (Rp. 150.000)

Tabel 22. Kunjungan Supervisi dan Pertemuan (dari Provinsi ke Kab./ Kota)

Supervisor/Narasumber	2				
Days	3				
Peserta Pertemuan	25				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
Perjalanan dari Provinsi ke Kab./ Kota	370.000	2	2	1.480.000	
DSA (Kab./ Kota)	980.000	2	3	1.960000	
Sewa Kendaraan	700.000	1	3	700.000	
Paket Pertemuan (Provinsi)	250.000	27	1	6.750.000	
Notulen	300.000	1	1	300.000	
ATK (Pertemuan pena, Perlengkapan, Foto Copy)	20.000	25	1	500.000	
Transport Lokal (Provinsi/Kab./ Kota)	150.000	25	1	3.750.000	
TOTAL				13.960.000	\$1.034

Asumsi:

- Kunjungan pengawasan berlangsung selama 3 hari termasuk pertemuan akhir

- Ada 2 pengawas yang diasumsikan datang dari tingkat provinsi dan memerlukan biaya perjalanan sebesar (2x Rp 370.000) dan DSA (Rp. 800.000 dikali 3 hari)
- Pengawas menyewa kendaraan selama 3 hari, dengannya biaya sebesar Rp 700.000 per hari
- Pengawas akan mengunjungi 2 fasilitas setiap harinya dengan rata-rata 6 kali per kunjungan pengawasan
- Akan dilakukan pertemuan di akhir kunjungan pengawasan, yang akan dihadiri oleh 25 peserta
- ATK fotokopi, alat tulis dan bolpen) tiap peserta Rp. 20.000
- Biaya transportasi lokal untuk peserta (Rp. 120.000)

Tabel 23. Kunjungan Supervisi (Kab./ Kota, hanya observasi)

Supervisor/Narasumber	2				
Hari	3				
	Biaya Unit	Unit	Hari	Total Biaya (Rupiah)	US\$
DSA hanya makan (Kab./ Kota)	100.000	2	3	600.000	
Biaya Bensin (per km)	1.000	250	3	750.000	
TOTAL				1.350.000	\$100

Asumsi:

- Kunjungan pengawasan berlangsung selama 3 hari
- Ada 2 pengawas yang diasumsikan datang dari tingkat kabupaten dan memerlukan DSA sebesar (Rp. 100.000 dikali 2 hari)
- Pengawas akan mengunjungi 2 fasilitas setiap harinya dengan rata-rata 6 kali per kunjungan pengawasan
- Rata-rata km perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan adalah 250km, dengan biaya bahan bakar diasumsikan sebesar Rp 1.000 per kilometer

Konsultasi

Sebagian besar konsultasi dalam Rencana Aksi / *Action Plan*, diasumsikan akan berlangsung selama 3 bulan dengan konsultan, dengan rata-rata konsultan tersebut dibayar Rp. 1,7 juta (sekitar US\$ 125) per hari (1 bulan – 22 hari). Studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian ini diasumsikan akan berlangsung selama 12 bulan.

Komunikasi Informasi Edukasi/ Kemonikasi Perubahan Perilaku (KIE/KPP)

Karena tidak ada informasi mengenai biaya kampanye yang direncanakan secara individu dan kegiatan KIE/KPP lainnya, pengeluaran yang direncanakan dari Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 digunakan untuk memperkirakan besarnya pengeluaran. Karena pengeluaran yang dikutip adalah untuk advokasi dan KIE, maka diasumsikan bahwa 50% dari jumlah total diperuntukkan untuk KIE, yang diperkirakan akan mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,5 triliun (atau sebesar \$ 111,6 juta) selama periode 2017-2019.

Tabel 24. Rencana Strategis BKKBN KIE dan Biaya Advokasi

Dalam Juta		2017		2018		2019		2017-2019	
		Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$
BKKBN Pusat		290.570	21,5	114.692	8,5	120.426	8,9	525.688	38,9
Peningkatan KIE di Tingkat Pusat		164.093	12,2	76.233	5,6	80.045	5,9	320.371	23,7
Tingkat Provinsi		648.938	48,1	741.032	54,9	778.083	57,6	2.168.053	160,6
Total		1.105.617	\$81,7	933.975	\$69,0	980.574	\$72,5	3.014.111	\$223,3

Tabel 25. Proyeksi Biaya untuk KIE

Dalam Juta		2017		2018		2019		2017-2019	
		Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$	Rupiah	US\$
BKKBN Pusat		145.285	10,7	57.346	4,3	60.213	4,46	262.844	19,5
Peningkatan KIE di Tingkat Pusat		82.046	6,1	38.117	2,8	40.023	2,9	160.186	11,9
Tingkat Provinsi		324.469	24,0	370.516	27,5	389.042	28,8	1.084.026	80,3
Total		551.800	\$40,9	465.978	\$34,5	489.277	\$36,2	1.507.056	\$111,6

Publikasi

Biaya juga diperkirakan dari desain, percetakan dan distribusi laporan dan pedoman (biaya poster, brosur dan materi KIE lainnya yang termasuk dalam bagian KIE).

Terdapat 5 variabel kunci yang diperlukan untuk estimasi biaya, yaitu:

- a. Jumlah halaman publikasi masih belum jelas
- b. Jumlah Salinan yang akan dicetak
- c. Biaya desain laporan
- d. Biaya percetakan dan distribusi per halaman

Berikut ini asumsi yang dibuat:

Jumlah halaman:

- 30-50 halaman untuk standar atau pedoman umum untuk didistribusikan ke BKKBN Pusat dan Provinsi, serta tingkat Kabupaten/ Kota (BKKN dan Dinas Kesehatan)
- 10 halaman agar panduan dapat didistribusikan lebih luas ke tingkat Kabupaten dan masyarakat (misalnya untuk semua Posyandu)

Jumlah Salinan yang akan didistribusikan:

Untuk sebagian besar pedoman diasumsikan bahwa sekitar 1500 eksemplar akan dicetak untuk didistribusikan ke staf utama di:

- tingkat Pusat (BKKBN, Kemenkes, UNFPA, Bappenas dan mitra lainnya) sebanyak 100 eksemplar
- tingkat Provinsi (kantor BKKBN di seluruh) sebanyak 100 eksemplar
- tingkat Kabupaten/ Kota (500 eksemplar untuk BKKBN dan 500 eksemplar untuk PKK) sebanyak 1000 eksemplar
- lainnya sebanyak 300 eksemplar

Untuk Pedoman Layanan Ramah Remaja diasumsikan bahwa Pedoman tersebut ada sebagai tambahan disamping semua kantor Kemenkes dan BKKBN di semua tingkat yang akan didistribusikan hingga ke 10 fasilitas swasta setiap kabupaten/ kota: $1500 + 10 \times 514 = 6500$ eksemplar (perkiraan)

Panduan untuk semua fasilitas kesehatan/ rumah sakit = kira-kira sebanyak 11.000 fasilitas kesehatan x 2 eksemplar = 22.000

Panduan yang dibuat untuk Posyandu, jumlah Posyandu: $289.635 = 300.000$ eksemplar

I. Hasil Pembiayaan

A. Komoditas Kontrasepsi

Tabel dan grafik berikut ini memperkirakan jumlah wanita yang memerlukan alat kontrasepsi berdasarkan rencana peningkatan dan juga jumlah dan alat kontrasepsi yang diperlukan.

Tabel 26. Total Jumlah Pengguna Kontrasepsi

	2016	2017	2018	2019
1. Populasi				
WUS	69.739.100	70.250.500	70.715.500	71.149.900
WUS yang Menikah	41.918.680	42.226.072	42.505.573	42.766.682
WUS yang belum menikah	27.820.420	28.024.428	28.209.927	28.383.218
WUS Tidak Menikah yang aktif (Sexually Active Unmarried WRA)	0	0	0	0
2. WUS Menikah - MCPR dan Metode Campuran				
Total CPR	61,9%	63,3%	64,6%	66,0%
Modern CPR	57,9%	59,1%	60,2%	62,0%
Sterilisasi Pria	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Sterilisasi Wanita	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
IUD	3,9%	4,6%	5,3%	6,0%
Implant	3,3%	4,0%	4,7%	5,4%
Suntik	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%
Pil	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%
Kondom Pria	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
Kondom Wanita	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Metode Tradisional	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
	61,9%	63,1%	64,2%	65,4%
3. Total Pengguna (Menikah)				
Sterilisasi Pria	83.837	84.452	85.011	85.533
Sterilisasi Wanita	1.341.398	1.351.234	1.360.178	1.368.534
IUD	1.634.829	1.935.362	2.238.627	2.544.618
Implant	1.383.316	1.682.005	1.983.593	2.288.017
Suntik	13.372.059	13.470.117	13.559.278	13.642.572
Pil	5.700.941	5.742.746	5.780.758	5.816.269
Kondom Pria	754.536	760.069	765.100	769.800
Kondom Wanita	1.676.747	1.689.043	1.700.223	1.710.667
TOTAL	25.947.663	26.715.028	27.472.769	28.226.010
4. Total Pengguna Users yang diberi Komoditas/ Layanan setiap tahun				
Sterilisasi Pria	7.052	7.064	7.055	7.062
Sterilisasi Wanita	112.838	113.021	112.885	112.985
IUD	365.372	655.931	723.996	792.649
Implant	439.701	730.975	827.215	924.297
Suntik	13.372.059	13.470.117	13.559.278	13.642.572
Pil	5.700.941	5.742.746	5.780.758	5.816.269
Kondom Pria	754.536	760.069	765.100	769.800
Tradisional	1.676.747	1.689.043	1.700.223	1.710.667
TOTAL	22.429.246	23.168.965	23.476.511	23.776.300

Berikut ini tabel dan grafik yang menunjukkan biaya komoditas dalam kriteria eksklusif dan termasuk biaya transportasi (asumsinya 40% di atas biaya komoditas) dengan jumlah masing-masing sebesar 2,2 Triliun Rupiah dan 3,1 Triliun Rupiah, selama 3 tahun.

Tabel 27. Total Jumlah Komoditas yang Dibutuhkan dan Biaya Komoditas

Total Komoditas Yang dibutuhkan	2017	2018	2019	2017-2019
Sterilisasi Pria	7.064	7.055	7.062	21.181
Sterilisasi Wanita	113.021	112.885	112.985	338.891
IUD	655.931	723.996	792.649	2.172.575
Implan	730.975	827.215	924.297	2.482.487
Suntik	53.880.468	54.237.112	54.570.286	162.687.865
Pil	74.655.695	75.149.854	75.611.494	225.417.042
Kondom Pria	54.724.989	55.087.223	55.425.620	165.237.832
Metode Tradisional	1.689.043	1.700.223	1.710.667	5.099.933
TOTAL				

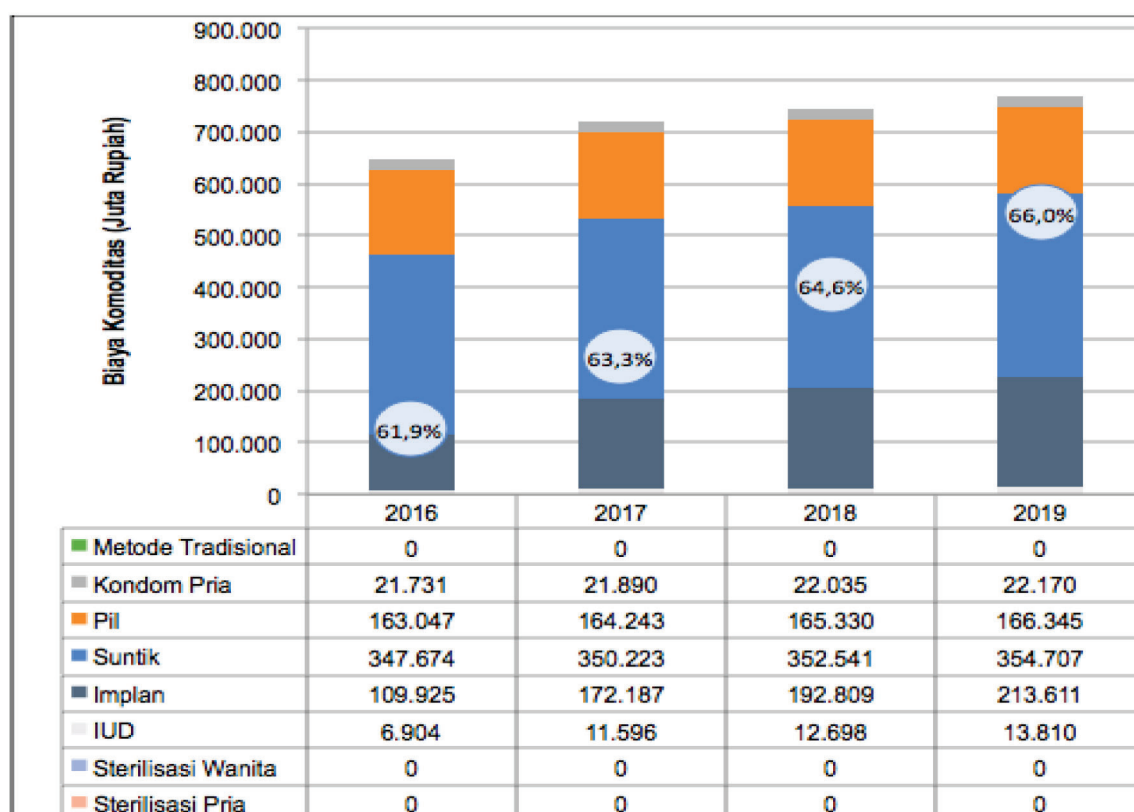
Total Biaya Komoditas (Juta Rupiah)

Sterilisasi Pria	0	0	0	0
Sterilisasi Wanita	0	0	0	0
IUD	12.394	13.680	14.977	41.051
Implan	182.744	206.804	231.074	620.622
Suntik	350.223	352.541	354.707	1.057.471
Pil	164.243	165.330	166.345	495.917
Kondom Pria	21.890	22.035	22.170	66.095
Metode Tradisional	0	0	0	0
TOTAL	731.493	760.389	789.274	2.281.156

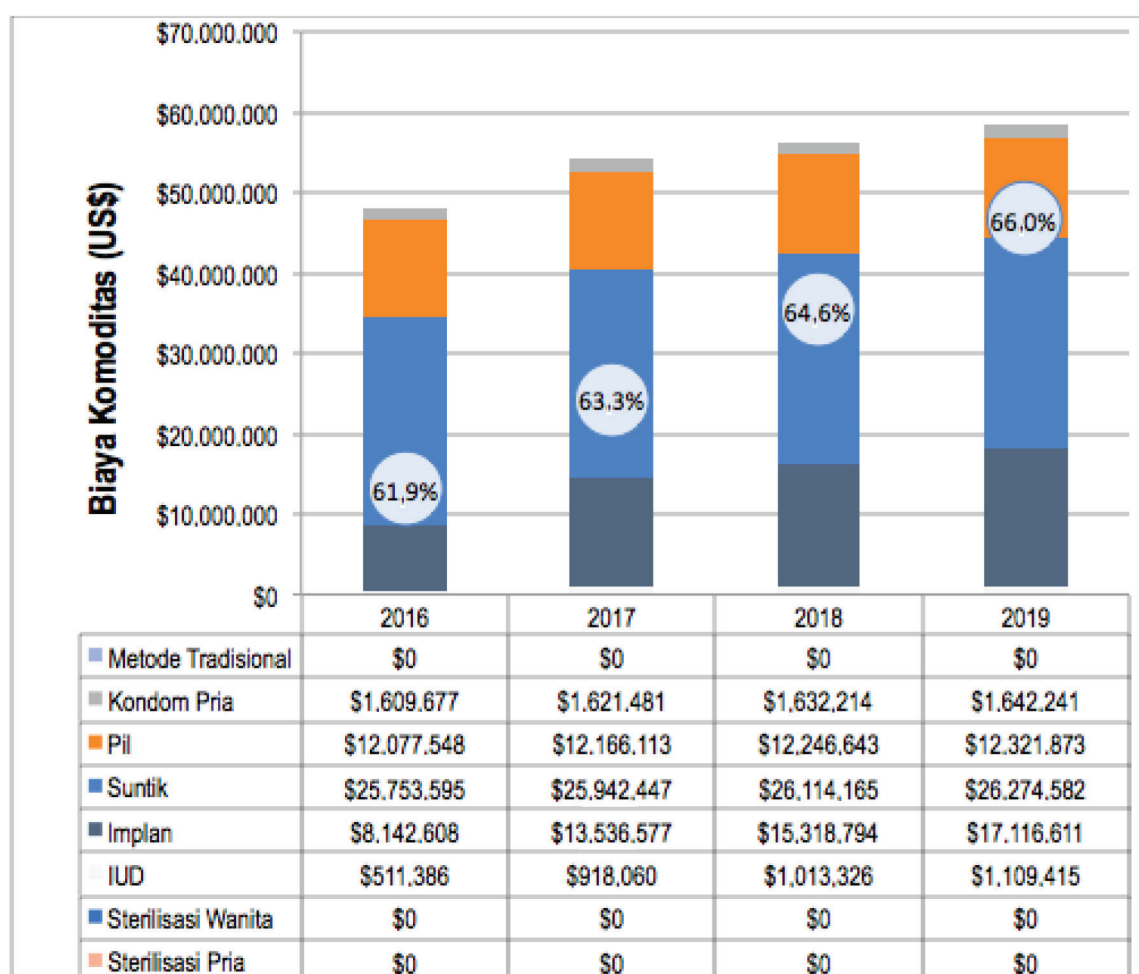
Total Biaya Komoditas (US\$)

			XR	13.500
Sterilisasi Pria	\$0	\$0	\$0	\$0
Sterilisasi Wanita	\$0	\$0	\$0	\$0
IUD	\$918.060	\$1.013.326	\$1.109.415	\$3.040.801
Implan	\$13.536.577	\$15.318.794	\$17.116.611	\$45.971.981
Suntik	\$25.942.447	\$26.114.165	\$26.274.582	\$78.331.194
Pil	\$12.166.113	\$12.246.643	\$12.321.873	\$36.734.629
Kondom Pria	\$1.621.481	\$1.632.214	\$1.642.241	\$4.895.936
Metode Tradisional	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$54.184.678	\$56.325.142	\$58.464.722	\$168.974.542

Gambar 4. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi Berdasarkan Metode (Juta Rupiah)

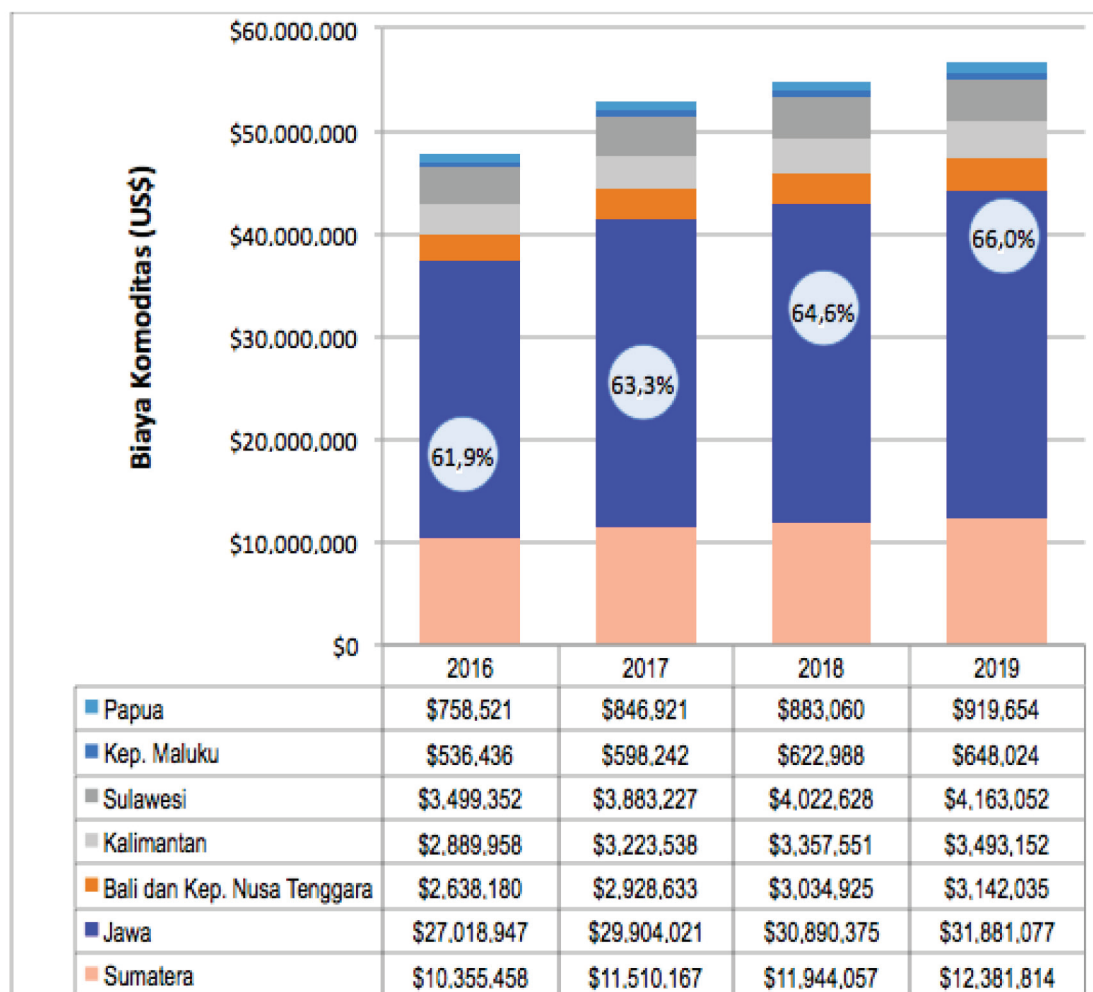


Gambar 5. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi Berdasarkan Metode (US\$)



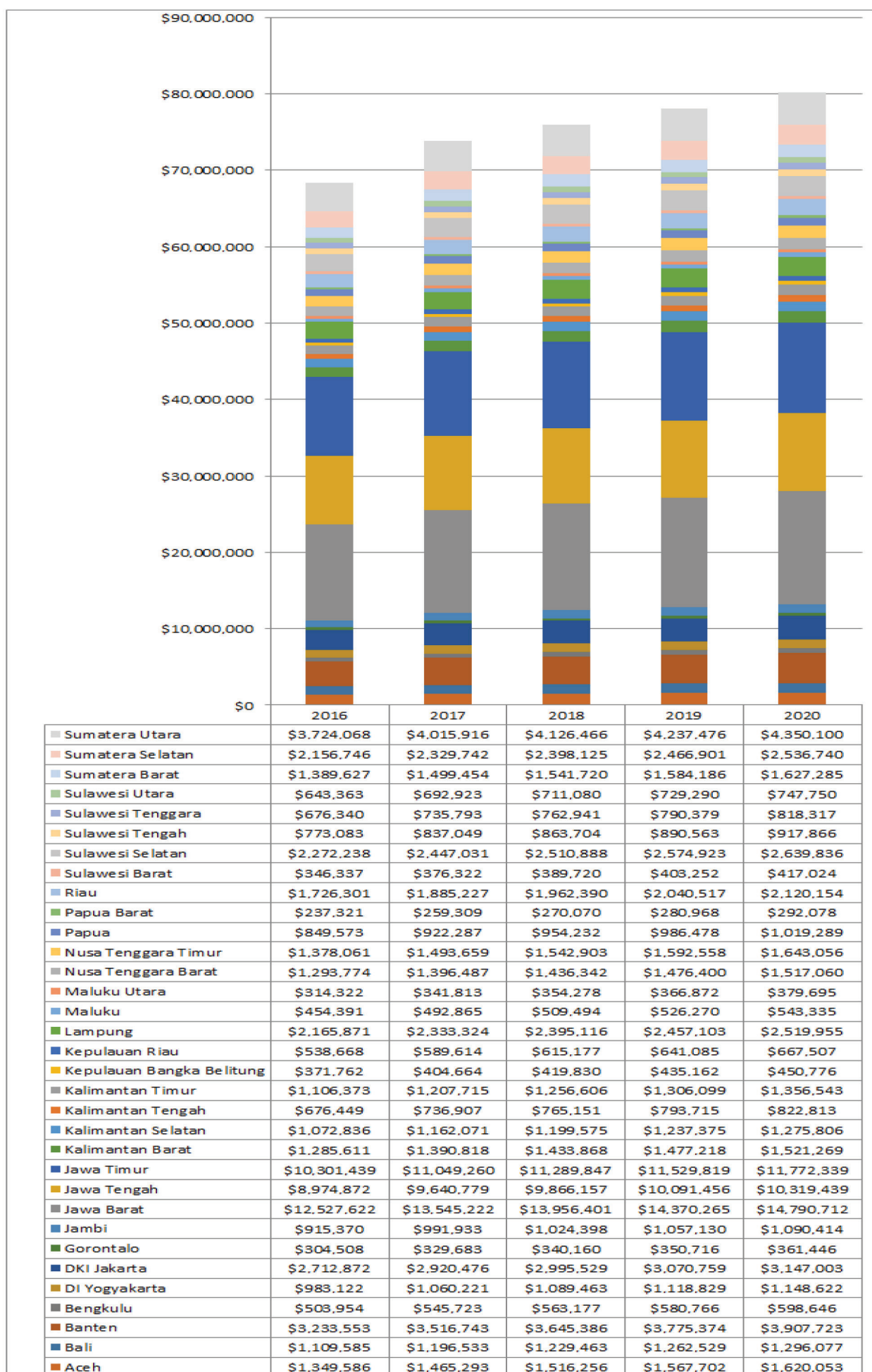
Dua grafik ini menunjukkan distribusi biaya ke seluruh pulau dan provinsi. Pulau Jawa dan Sumatera mencapai lebih dari ¾ dari total permintaan masing-masing sebesar 56,3% dan 21,9%.

Gambar 6. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi (diluar biaya transportasi) berdasarkan Pulau (US\$)



Menurut provinsi, 3 provinsi di Jawa menyumbang pangsa terbesar, dengan masing-masing sebesar 18,4% (Jawa Barat), 14,8% (Jawa Timur) dan 12,9% (Jawa Tengah).

Gambar 7. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi berdasarkan Provinsi (US\$)



Pada akhirnya, biaya obat lain dan persediaan yang dibutuhkan (misalnya persediaan yang diperlukan untuk sterilisasi dan jarum suntik pria dan wanita, sarung tangan dan bahan medis habis pakai lainnya yang diperlukan untuk metode jangka panjang lainnya) termasuk didalamnya. Dua tabel berikut menyajikan hasil eksklusif dan termasuk biaya transportasi (dengan asumsi markup sebesar 40% untuk mendistribusikan komoditas ke berbagai provinsi dan kabupaten).

Tabel 28. Biaya yang dibutuhkan untuk Obat Lain dan Persediaan

	2017		2018		2019		2017-2019	
	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$
Sterilisasi Pria	163	\$12.074	163	\$12.074	163	\$12.074	488	\$36.148
Sterilisasi Wanita	7.305	\$541.111	7.297	\$540.519	7.303	\$540.963	21.905	\$1.622.593
IUD	5.313	\$393.556	5.864	\$434.370	6.420	\$475.556	17.598	\$1.303.556
Implan	33.990	\$2.517.778	38.465	\$2.849.259	42.980	\$3.183.704	115.436	\$8.550.815
Suntik	80.012	\$5.926.815	80.542	\$5.966.074	81.037	\$6.002.741	241.591	\$17.895.630
Pil	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
Kondom Pria	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
Metode Tradisional	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
TOTAL	126.784	\$9.391.407	132.331	\$9.802.296	137.903	\$10.215.037	397.019	\$29.408.815

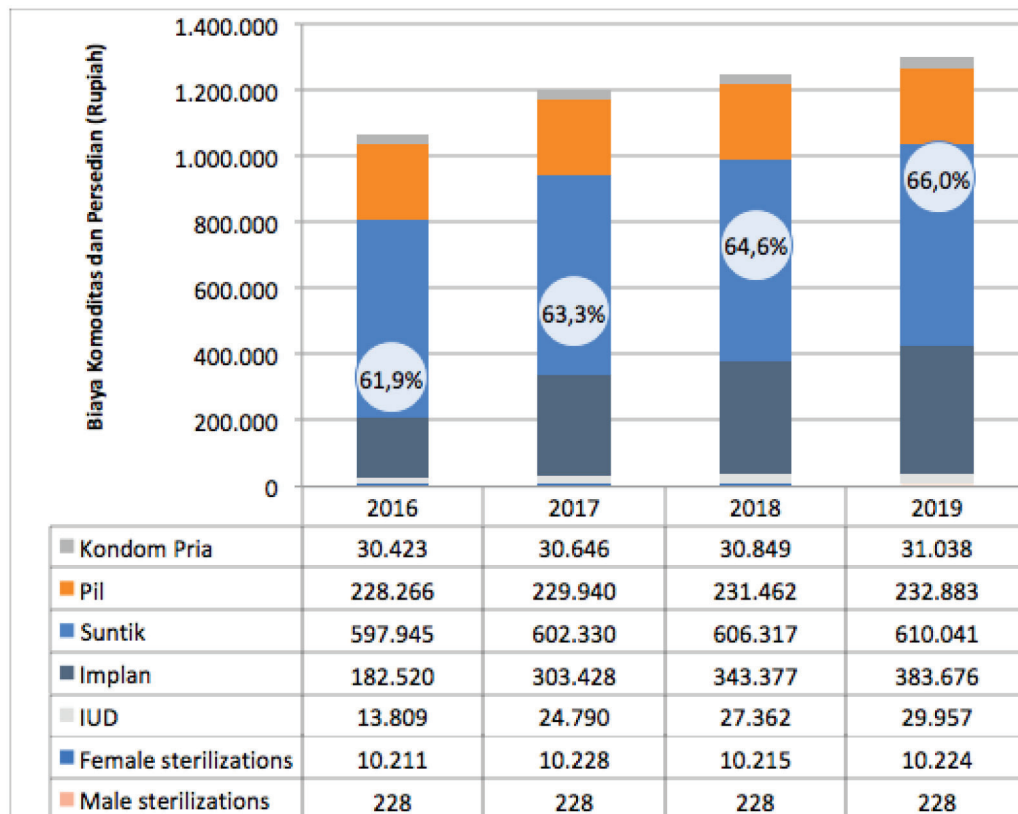
Tabel 29. Total Biaya Komoditas dan Persediaan

	2017		2018		2019		2017-2019	
	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$
Sterilisasi Pria	163	\$12.065	163	\$12.050	163	\$12.061	24.604	\$36.177
Sterilisasi Wanita	7.305	\$541.144	7.297	\$540.494	7.327	\$540.970	1.103.544	\$1.622.609
IUD	17.707	\$1.311.618	19.544	\$1.447.724	15.339	\$1.585.004	2.625.434	\$4.344.346
Implan	216.734	\$16.054.380	245.269	\$18.168.089	216.009	\$20.300.301	32.751.784	\$54.522.770
Suntik	430.236	\$31.869.299	433.083	\$32.080.247	438.320	\$32.277.314	65.248.609	\$96.226.860
Pil	164.243	\$12.166.113	165.330	\$12.246.643	167.329	\$12.321.873	24.908.674	\$36.734.629
Kondom Pria	21.890	\$1.621.481	22.035	\$1.632.214	22.301	\$1.642.241	3.319.790	\$4.895.936
Metode Tradisional	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
TOTAL	858.277	\$63.576.101	892.721	\$66.127.462	866.789	\$68.679.763	129.982.438	\$198.383.326

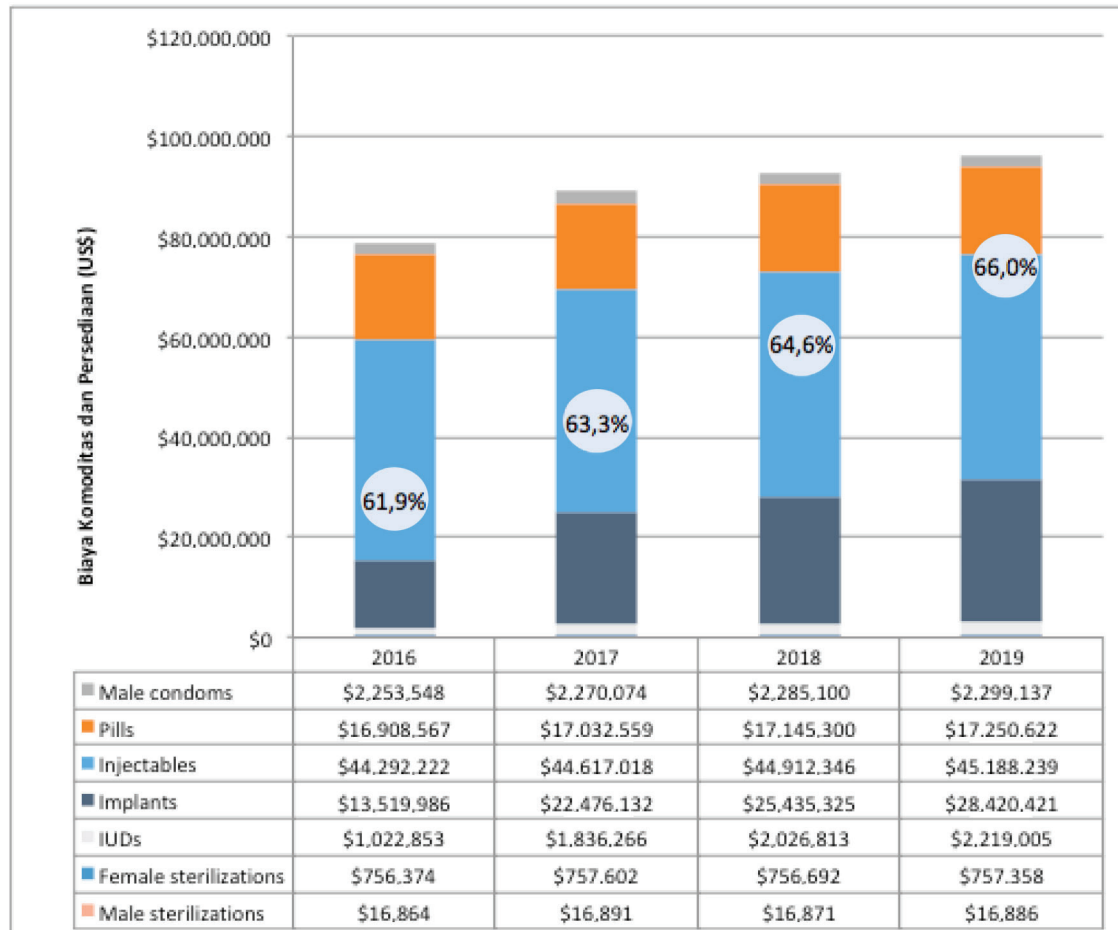
Tabel 30. Total Biaya Komoditas dan Termasuk Biaya Transportasi

	2017		2018		2019		2017-2019	
	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$	Rupiah (Juta)	US\$
Sterilisasi Pria	228	\$16.891	228	\$16.871	228	\$16.886	684	\$50.647
Sterilisasi Wanita	10.228	\$757.602	10.215	\$756.692	10.224	\$757.358	30.667	\$2.271.652
IUD	24.790	\$1.836.266	27.362	\$2.026.813	29.957	\$2.219.005	82.108	\$6.082.084
Implan	303.428	\$22.476.132	343.377	\$25.435.325	383.676	\$28.420.421	1.030.480	\$76.331.878
Suntik	602.330	\$44.617.018	606.317	\$44.912.346	610.041	\$45.188.239	1.818.688	\$134.717.604
Pil	229.940	\$17.032.559	231.462	\$17.145.300	232.883	\$17.250.622	694.284	\$51.428.481
Kondom Pria	30.646	\$2.270.074	30.849	\$2.285.100	31.038	\$2.299.137	92.533	\$6.854.310
Metode Tradisional	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0
TOTAL	1.201.588	\$89.006.541	1.249.809	\$92.578.446	1.298.048	\$96.151.669	3.749.445	\$277.736.656

Gambar 8. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi dan Persediaan (Termasuk biaya Transportasi) berdasarkan Metode (Juta Rupiah)



Gambar 9. Total Biaya Komoditas Kontrasepsi dan Persediaan (Termasuk biaya Teransportasi) berdasar metode (US\$)



B. Total Biaya Pelayanan KB

Tabel 31. Estimasi Total Jasa Pelayanan untuk Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana Tingkat Nasional

Jenis KB	Pengguna KB			Frekuensi Kunjungan/ tahun	Tarif JKN (rupiah)	Estimasi Jasa Pelayanan (milyar rupiah)			Total
	2017	2018	2019			2017	2018	2019	
Sterilisasi Pria	7.064	7.055	7.062	1	350.000	2,47	2,47	2,47	7,41
Sterilisasi Wanita	113.021	112.885	112.985	1	816.500	92,28	92,17	92,25	276,70
IUD	655.931	723.996	792.649	1	100.000	65,59	72,40	79,26	217,26
Implant	730.975	827.215	924.297	1	100.000	73,10	82,42	91,44	248,96
Suntik	13.470.117	13.559.278	13.642.572	4	15.000	808,21	43,83	2,39	854,43
Total	14.977.108	15.230.429	15.479.565			1.041,65	293,25	261,10	1.604,00

Sumber: Dokumen CIP 2016, Total Pengguna yang diberi Komoditas/ Layanan setiap tahun

Tabel di atas menunjukkan bahwa estimasi jasa pelayanan untuk KB suntik berpotensi menjadi biaya terbesar di antara jenis pelayanan KB lain yang dicakup dalam program JKN. Estimasi jasa pelayanan KB suntik sebesar 26 kali estimasi jasa pelayanan IUD dan 16,5 kali estimasi jasa pelayanan implan. Tingginya pengguna KB suntik dan implan menjadi pertimbangan dalam memprioritaskan tujuan strategis dan luaran yang dipilih dalam mendukung pelaksanaan KB Berbasis Hak Terintegrasi.

C. Total Biaya Peta Jalan Keluarga Berencana (KB)

Tabel 32. Total Rekapitulasi Biaya

No	Kegiatan		Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)
Tujuan Strategis 1: Tersedianya Sistem penyediaan pelayanan KB yang adil dan berkualitas di sektor publik dan swasta untuk memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan reproduksi mereka.				
1.1	Keluaran 1.1: Meningkatnya ketersediaan pelayanan KB dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat memenuhi tujuan reproduksi mereka.			
	1.1.1	Mengkaji dan merevisi standar fasilitas dan pedoman yang ada untuk pelayanan KB terpadu dengan mempertimbangkan pengelompokan klien berdasarkan umur, kesamaan karakteristik, tahap reproduksi, dsb, sehingga pelanggaran hak tidak terjadi.	10.331.410.000	\$765.290
	1.1.2	Menyepakati kriteria fasilitas pelayanan KB antara BKKBN, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan	73.410.000	\$5.438
	1.1.3	Pemetaan fasilitas pelayanan KB (pemerintah dan swasta) berdasarkan kriteria yang telah disepakati, termasuk melihat pelayanan keliling/bergerak di daerah terpecil, perbatasan dan kepulauan dan status berfungsinya.	2.701.060.000	\$200.079
	1.1.4	Berdasarkan hasil pemetaan, melakukan kegiatan sebagai berikut: -Meningkatkan fungsi fasilitas berdasarkan kesenjangan yang diidentifikasi dari pemetaan untuk mencapai akses yang merata ke metode jangka pendek dan jangka panjang. -Meningkatkan kualitas fasilitas terpilih sebagai sarana rujukan berdasarkan pemetaan untuk menjamin akses yang merata.	74.369.335.000	\$5.508.840

No	Kegiatan	Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)
	-Memperkuat pelayanan keliling (pelayanan luar gedung pemerintah dan pelayanan momentum) untuk menyediakan pelayanan berkualitas secara teratur, termasuk tindak lanjut dan penanganan efek samping.		
1.1.5	Akreditasi fasilitas kesehatan: mengkaji dan memperluas ruang lingkup standar akreditasi puskesmas saat ini (yang dikembangkan oleh Bina Upaya Kesehatan/BUK Kemenkes) sehingga mencakup pelayanan KB sebagai syarat untuk registrasi BPJS. Terkait dengan Ouput 3.2.	42.360.000	\$3.138
1.1.6	Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang ramah remaja	0	\$0
1.1.6.1	Merevisi atau mengembangkan strategi pengendalian pelayanan ramah remaja yang akan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari wilayah dengan angka fertilitas remaja tinggi.	58.335.580.000	\$4.321.154
1.1.6.2	Mengembangkan kerjasama antara PIK remaja, Puskesmas PKPR dan pelayanan remaja lainnya dalam melaksanakan strategi di atas.	9.751.960.000	\$722.367
1.1.6.3	Merevisi atau mengembangkan pedoman penanganan rujukan untuk pendidik sebaya dan tenaga kesehatan di bawah koordinasi Kemenkes.	2.204.785.000	\$163.317
1.1.6.4	Pelatihan petugas termasuk rujukan untuk pelayanan spesialis.	186.211.040.000	\$13.793.410
1.1.6.5	Menyelenggarakan kampanye publik mengenai pelayanan ramah remaja.	265.950.997.000	\$19.700.074
1.1.7	Pengendalian dan mempromosikan pelayanan kesehatan reproduksi ramah remaja.	17.611.860.000	\$1.304.582
1.1.8	Penyediaan pelayanan KB pada situasi bencana kemanusiaan yang mengacu pada Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) untuk meningkatkan akses ke pelayanan kontrasepsi dan kontrasepsi darurat. Pedoman ini juga meliputi penyediaan kontrasepsi kepada korban kekerasan berbasis gender.	11.931.120.000	\$883.787
1.1.9	Menyediakan jasa pelayanan untuk pemasangan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan	3.189.942.171.500	\$236.292.013
	Keluaran 1.1 Sub Total	3.814.682.033.167	\$282.569.039
1.2	Keluaran 1.2: Meningkatkan pemanfaatan sektor swasta dalam pemerataan akses ke pelayanan KB berkualitas yang memperhatikan hak klien. Sektor swasta di bidang kesehatan di sini adalah semua organisasi dan individu yang dalam melaksanakan kegiatannya di bidang pelayanan kesehatan dan tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah.		
1.2.1	Pengembangan model bisnis kemitraan pemerintah-swasta yang berkelanjutan melalui jaringan standarisasi model pelayanan KB swasta, dengan fokus pada peningkatan akses ke pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Rencana jaringan model pelayanan KB swasta mencakup jenis model secara penuh atau parsial. Peran dan tanggungjawab jaringan ini akan didefinisikan lebih lanjut.	61.778.880.000	\$4.576.213
1.2.2	Pemasaran sosial kontrasepsi (pihak swasta/LSM) untuk meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas di sektor swasta dengan cara membangun program yang sudah ada atau memulai program baru, dengan menjamin kerahasiaan dan mengurangi biaya (terkait dengan Output 1.1).	61.613.680.000	\$4.563.976
	Keluaran 1.2 Sub Total	123.392.560.000	\$9.140.190
1.3	Keluaran 1.3: Meningkatkan Sistem Jaminan Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi		
1.3.1	Pengadaan kontrasepsi yang dijamin berkualitas, termasuk mengembangkan sistem e-procurement (terkait dengan Output 3.1).	31.993.455.000	\$2.369.886
1.3.2	Sistem Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi yang berkualitas:	0	\$0
1.3.2.1	Revisi strategi mengenai keamanan komoditas kontrasepsi yang mencerminkan pengadaan terjamin kualitasnya.	16.006.160.000	\$1.185.641
1.3.2.2	Menjamin ketersediaan komoditas KB sesuai dengan peramalan kebutuhan alokan untuk klien.	3.749.444.858.215	\$277.736.656
1.3.2.3	Mengkaji standar produsen untuk berbagai kontrasepsi dan pelaksanaannya.	232.500.000	\$17.222
1.3.2.4	Memperbaiki pergudangan:	295.786.995.000	\$21.910.148
1.3.3	Memperkuat manajemen rantai pasokan: Evaluasi tiga model yang sedang dilaksanakan untuk melihat efisiensi, cost-effectiveness, dan keberlangsungan (ketiga model tersebut adalah perbaikan sistem distribusi BKBKN, menggunakan sistem	31.883.920.000	\$2.361.772

No	Kegiatan	Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)
	yang terintegrasi dengan Kemenkes dan menggunakan distribusi melalui pos).		
1.3.4	Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Logistik dan peramalan:	0	\$0
1.3.4.1	Mengkaji Sistem Informasi Manajemen Logistik yang ada dan menilai efektivitasnya untuk memprediksi stock-out dan membuat perubahan jika diperlukan.	2.196.520.000	\$ 162.705
1.3.4.2	Mengembangkan kapasitas peramalan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta rumah sakit dan puskesmas (terkait dengan Output 1.4).	24.749.035.000	\$ 1.833.262
Keluaran 1.3 Sub Total		4.152.293.443.215	\$307.577.292
1.4	Keluaran 1.4: Meningkatkan kapasitas dan ketersediaan sumberdaya manusia untuk menyediakan pelayanan KB yang berkualitas		
1.4.1	Pelayanan KB yang berkualitas dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas	0	\$0
1.4.1.1	Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan untuk pelayanan KB.	4.988.180.000	\$369.495
1.4.1.2	Melaksanakan pelatihan pre-service KB.	341.797.565.000	\$25.318.338
1.4.1.3	Melaksanakan pelatihan In-service pelayanan KB untuk para bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kapasitas mereka.	138.262.585.000	\$10.241.673
1.4.1.4	Mengembangkan konsensus mengenai peran perawat dalam KB dan memperluas cakupan pelayanan KB yang dapat diberikan oleh bidan.	39.948.720.000	\$2.959.164
1.4.2	Manajemen program	0	\$0
1.4.2.1	Melaksanakan pelatihan sistem informasi manajemen (terkait dengan Output 1.5)	63.557.250.000	\$4.707.944
1.4.2.2	Melaksanakan pelatihan manajemen program KB (termasuk perencanaan, pembiayaan, dan money) termasuk kepemimpinan untuk mengelola program tingkat provinsi dan kabupaten/kota di SKPD KB maupun Dinas Kesehatan (terkait dengan Output 3.3).	52.391.395.000	\$3.880.844
1.4.2.3	Melaksanakan pelatihan Jaga mutu untuk penyelia dan pengelola program (terkait dengan Output 1.6)	65.140.355.000	\$4.825.211
1.4.2.4	Melaksanakan pelatihan perbandingan pergudangan, sistem informasi manajemen logistik dan peramalan (terkait dengan Output 1.3)	11.803.070.000	\$874.301
Keluaran 1.4 Sub Total		717.889.120.000	\$53.176.972
1.5	Keluaran 1.5: Diperkuatnya sistem informasi manajemen untuk menjamin kualitas, kelengkapan serta integrasi yang sejalan dengan sistem kesehatan		
1.5.1	Melakukan kajian sistem pelaporan dan pencatatan saat ini -Tinjauan bersama lintas sektor mengenai sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB pada tingkat kabupaten/kota yang meliputi mekanisme pelaporan, sistem pengumpulan data dan validasi data.	9.939.560.000	\$736.264
1.5.2	Mengembangkan sistem pelaporan KB terpadu dari fasilitas kesehatan termasuk fasilitas kesehatan sektor swasta.	61.745.507.500	\$4.573.741
1.5.3	Membangun kapasitas para penyelia untuk mengkaji dan menganalisa Sistem Informasi Manajemen (SIM) (terkait dengan Output 1.4).	84.593.255.000	\$6.266.167
1.5.4	Mengembangkan sistem yang melakukan penelusuran klien melalui tickler files (sistem pelacakan perorangan), serta sistem siaga (alert system) yang terkomputerisasi (terkait dengan Tujuan strategis 4).	61.580.640.000	\$4.561.529
1.5.5	Mengembangkan proyek percontohan untuk pelaporan elektronik (terkait dengan Tujuan strategis 4)	89.736.270.000	\$6.647.131
Keluaran 1.5 Total		307.595.232.500	\$22.784.832
1.6	Keluaran 1.6: Meningkatkan kualitas pelayanan KB yang memperhatikan hak klien dan mengintegrasikan pelayanan sepanjang kontinum siklus kesehatan reproduksi		
1.6.1	Mengkaji standar yang ada untuk pelayanan KB (konseling – untuk metode umum dan khusus, instruksi mengenai penggunaan metode, prosedur, rujukan, tindak lanjut, penapisan infeksi menular seksual dan HIV serta perlindungan ganda) dan melakukan revisi jika diperlukan (terkait dengan 3.2).	3.608.397.500	\$267.289
1.6.2	Membangun sistem jaga mutu/perbaikan kualitas:	0	\$0
1.6.2.1	Mengkaji sistem Jaga Mutu pelayanan KB yang ada – pedoman, implementasi, efisiensi, dan efektifitas.	75.485.160.000	\$5.591.493
1.6.2.2	Meningkatkan sistem jaga mutu untuk KB yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu dan membentuk siklus jaga mutu di berbagai jenjang sistem kesehatan dan KB.	0	\$0

No	Kegiatan		Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)
	1.6.2.3	Mengkaji uraian kerja para penyelia di dinas kesehatan kabupaten/kota serta di SKPD KB untuk menjamin bahwa deskripsi pekerjaan ini meliputi tanggungjawab penyeliaan serta melakukan revisi deskripsi pekerjaan untuk mengatasi kesenjangan.	0	\$0
	1.6.2.4	Membangun kapasitas penyelia (Bidan Koordinator dan lainnya) melakukan supervisi fasilitatif dan jaga mutu (terkait dengan Output 1.4).	32.731.775.000	\$2.424.576
	1.6.2.5	Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menjamin bahwa kegiatan penyeliaan mendapat dukungan.	12.502.080.000	\$926.080
	1.6.2.6	Pembentukan sistem pemantauan yang kualitas dan berkelanjutan serta melakukan tindakan perbaikan.	5.375.640.000	\$398.196
	1.6.3	Melibatkan berbagai organisasi masyarakat untuk memastikan kualitas terjamin.	37.021.960.000	\$2.742.367
	Keluaran 1.6 Sub Total		166.725.012.500	\$12.350.001
Tujuan Strategis 2: Meningkatkan permintaan penggunaan metode kontrasepsi modern dengan penggunaan yang berkesinambungan.				
2.1	Keluaran 2.1: Tersedianya strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (Behavior Change Communication) yang komprehensif.			
	2.1.1	Memperbarui/mengembangkan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada remaja untuk perubahan perilaku yang komprehensif, terarah, dan mencakup: – komponen pemantauan dan evaluasi. – strategi khusus untuk mempertahankan kinerja di kabupaten/kota dengan kinerja yang baik serta memperbaiki kinerja di kabupaten/kota dengan kinerja yang buruk. – fokus pada keterlibatan pria. – fokus pada pemberian informasi kepada remaja.	317.307.126.667	\$23.504.232
	2.1.2	Meningkatkan kapasitas petugas terakrit untuk melaksanakan strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.	55.162.295.000	\$4.086.096
	2.1.3	Mengembangkan materi muatan lokal dan menyebarkan materi tersebut dengan menggunakan saluran komunikasi strategis dengan jangkauan maksimum. – Pesan ini menangani hambatan budaya dan agama serta informasi yang tidak tepat mengenai kontrasepsi sesuai kebutuhan. Pesan bersifat sensitif terhadap gender dan ditargetkan kepada kelompok-kelompok khusus. – Integrasi pesan-pesan KB dengan pesan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pesan mengenai pencegahan HIV dan infeksi menular seksual.	524.200.000	\$38.830
	2.1.4	Pencetakan dan distribusi poster dan brosur mengenai KB dan menjamin ketersediaan materi ini di puskesmas, polindes, podes, dan rumah sakit.	251.175.941.667	\$18.605.625
	2.1.5	Mengembangkan sistem pengkajian yang teratur untuk melihat jangkauan saluran media dan dampak dari pesan-pesan yang dikembangkan.	29.190.480.000	\$2.162.258
	2.1.6	Mengembangkan sistem pesan KB melalui telepon genggam (terkait dengan Output 1.6)	0	\$0
	2.1.6.1	Mengembangkan rencana penggunaan pesan telepon genggam untuk mengingatkan waktu mendapatkan pelayanan KB ulang serta memberikan informasi lainnya..	251.213.641.667	\$18.608.418
	2.1.7	Memasukkan pesan kesehatan reproduksi dan KB dalam sesi pendidikan/promosi kesehatan selama pelayanan antenatal, pelayanan kesehatan anak, serta pengobatan infeksi menular seksual dan HIV melalui koordinasi antara SKPD KB dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.	9.831.120.000	\$728.231
	Keluaran 2.1 Sub Total		914.404.805.000	\$67.733.689
2.2	Keluaran 2.2: Meningkatnya keterlibatan tenaga kesehatan, petugas lapangan keluarha berencana kelompok perempuan, dan tokoh agama dalam menggerakkan dukungan untuk program KB serta mengatasi hambatan dalam ber-KB			
	2.2.1	Mendukung organisasi keagamaan dan masyarakat untuk mempromosikan KB dalam kegiatan keagamaan dan menggunakan kesempatan seperti konseling pra-nikah.	51.992.737.500	\$3.851.314
	2.2.2	Memperkuat komponen KB dalam Posyandu -Aktivasi pelayanan KB di meja ke 5 Posyandu -Tenaga kesehatan mempromosikan KB ketika mendaftarkan para ibu, menimbang anak-anak, dll.	15.888.215.000	\$1.176.905
	2.2.3	Meninjau dan mengembangkan insentif berdasarkan kinerja kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki, pemuda, dan masyarakat (terkait dengan Output 3.5)	0	\$0
	2.2.3.1	Menyediakan materi untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki melalui pendidikan dan diskusi di tingkat desa.	361.628.555.556	\$26.787.300

No	Kegiatan		Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)
	2.2.3.2	Mengembangkan insentif berdasarkan kinerja kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki, pemuda, dan masyarakat.	336.600.000	\$24.933
	2.2.4	Meningkatkan kapasitas pimpinan pemuda sebagai pendidik sebaya untuk informasi dan pelayanan KB bagi remaja dan pemuda.	19.031.785.000	\$1.409.762
	2.2.5	Mengembangkan strategi untuk menghidupkan kembali upaya berbasis masyarakat yang sukses di masa lalu dengan mengkaji secara mendalam evaluasi gerakan ini untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengembangkan rencana mengatasi kesenjangan tersebut yang relevan dengan situasi saat ini.	31.959.320.000	\$2.367.357
	2.2.6	Memastikan ketersediaan Petugas Pelayanan Keluarga Berencana (PLKB) untuk meningkatkan permintaan program KB.	23.558.180.000	\$1.745.050
Keluaran 2.2 Sub Total			504.395.393.056	\$37.362.622
2.3	Keluaran 2.3: Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dan Pemahaman tentang Keluarga Berencana			
	2.3.1	Melakukan advokasi ke berbagai pemangku kepentingan melalui media, audiensi dan melalui kegiatan forum lain	9.751.960.000	\$722.367
	2.3.2	Melakukan promosi dan program KIE untuk Keluarga Berencana melalui berbagai media (media cetak, elektronik, media uar ruangan, dan below the line))	83.725.313.889	\$6.201.875
	2.3.4	Melakukan promosi dan program KIE untuk Keluarga Berencana melalui fasilitas kesehatan yang dianggap penting	83.725.313.889	\$6.201.875
Keluaran 2.3 Sub Total			177.202.587.778	\$13.126.118
Tujuan Strategis 3: Meningkatkan bimbingan dan pengelolaan di seluruh jenjang pelayanan serta lingkungan yang mendukung untuk program KB yang efektif, adil, dan berkelanjutan pada sektor publik dan swasta untuk memungkinkan semua pihak memenuhi tujuan-tujuan reproduksi mereka.				
3.1	Keluaran 3.1: Meningkatkan kapasitas untuk penatalayanan/pengelolaan internal dan lintas institusi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk program yang efisien dan berkelanjutan			
	3.1.1	Mengawasi dan membimbing penyediaan pelayanan keluarga berencana (pemerintah dan swasta) untuk melindungi hak reproduksi masyarakat	0	\$0
	3.1.1.1	Mengembangkan pedoman untuk topik berikut ini:	145.060.080.000	\$10.745.191
	3.1.1.2	Melakukan orientasi mengenai pedoman di atas untuk petugas yang berwenang	31.717.500.000	\$2.349.444
	3.1.1.3	Memantau kepatuhan pada pedoman dan sistem	61.519.500.000	\$4.557.000
	3.1.2	Pengadaan Kontrasepsi	0	\$0
	3.1.2.1	Melaksanakan peraturan mengenai pengadaan komoditas dengan kualitas yang terjamin (komoditas yang memenuhi standar pre-kualifikasi WHO)	61.501.480.000	\$4.555.665
	3.1.2.2	Mengembangkan sistem e-procurement	61.618.340.000	\$4.564.321
	3.1.3	Pengembangan sistem	0	\$0
	3.1.3.1	Mengembangkan sistem pendanaan berbasis kinerja untuk kabupaten/kota yang mencapai sasaran program KB yang disepakati sebelumnya (transfer dana dari BKKBN ke kabupaten/kota yang mencapai target)	60.341.322.500	\$4.469.728
	3.1.4	Pemantapan kerjasama lintas sektor	0	\$0
	3.1.4.1	Mengkaji perjanjian (Memorandum of Understanding/MOU) yang ditandatangani dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan institusi lainnya untuk mempromosikan dan memperluas pelayanan dan keberlangsungan program KB dan melakukan perubahan jika dibutuhkan	9.751.960.000	\$722.367
	3.1.5	Pengembangan kapasitas	0	\$0
	3.1.5.1	Mengembangkan kapasitas staf BKKBN tingkat provinsi untuk melaksanakan analisis anggaran KB di tingkat kabupaten/kota dari berbagai sumber, yang dilakukan secara tahunan, untuk menjamin alokasi yang memadai menurut standar minimum	61.690.092.500	\$4.569.636
Keluaran 3.1 Sub Total			493.200.275.000	\$36.533.354
3.2	Keluaran 3.2: Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memantapkan kontribusi sistem kesehatan terhadap KB di berbagai tahap dalam siklus kesehatan reproduksi.			
	3.2.1	Berdasarkan perjanjian (Memorandum of Understanding/MOU) yang ditandatangani oleh Kemenkes untuk memperkuat	0	\$0

No	Kegiatan	Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)
	kontribusi sistem kesehatan di program KB::		
	3.2.1.1 Mengkaji dan merevisi standar dan pedoman yang ada untuk pelayanan KB terpadu.	10.281.122.500	\$761.565
	3.2.1.2 Mengkaji standar pelayanan KB dan melakukan pemutihan di bawah koordinasi Kemenkes dan bekerjasama dengan organisasi profesi untuk menjamin tidak adanya hambatan dalam sistem kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya menurut kontinum pelayanan kesehatan reproduksi (Berhubungan dengan Output 1.6).	30.359.072.500	\$2.248.820
	3.2.1.3 Mengembangkan mekanisme untuk sertifikasi pelatihan KB, integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan, jaminan ketersediaan kontrapresi dan supervisi (terkait dengan Output 1.5, 1.3).	60.796.880.000	\$4.503.473
	3.2.2 Mengembangkan strategi untuk memantapkan program KB pasca-salin dan pasca-keguguran.	61.572.907.500	\$4.560.956
	3.2.3 Mengembangkan kriteria untuk akreditasi fasilitas pelayanan KB baik sektor pemerintah maupun yang dikembangkan sebagai syarat registrasi BPJS (terkait dengan Output 1.1, 1.2).	43.095.480.000	\$3.192.258
	3.2.4 Melakukan koordinasi pelatihan KB di tingkat kabupaten/kota antara SKPD KB dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota sejak tahap perencanaan.	30.247.860.000	\$2.240.582
	3.2.5 Merencanakan kunjungan supervisi bersama antara PLKB dan badan koordinator secara teratur dan menciptakan lingkungan yang mendukung seperti persetujuan kegiatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, alokasi dana yang memadai untuk perjalanan, dan sebagainya.	104.743.020.000	\$7.758.742
	Keluaran 3.2 Sub Total	341.096.342.500	\$25.266.396
3.3	Keluaran 3.3: Meningkatkan kepemimpinan dan kapasitas pejabat SKPD KB dan pejabat Kesehatan Kabupaten/kota untuk secara efektif mengelola program KB.		
	3.3.1 Mengkaji peran dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/kota serta SKPD KB untuk mengidentifikasi area kerjasama yang potensial.	17.528.040.000	\$1.298.373
	3.3.2 Meningkatkan kapasitas pejabat SKPD KB dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam::	0	\$0
	3.3.2.1 Perencanaan, pengembangan rencana kerja, analisis anggaran dan advokasi untuk meningkatkan sumberdaya (sumber daya finansial maupun sumber daya manusia) untuk program KB.	32.280.497.500	\$2.391.148
	3.3.2.2 Advokasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan untuk membahas pentingnya KB untuk pembangunan sosial ekonomi serta pentingnya alokasi yang memadai untuk pelayanan dan anggaran operasional program KB.	31.313.877.500	\$2.319.546
	3.3.2.3 Membentuk mekanisme Jaga Mutu/Perbaikan Mutu (terkait dengan Output 1.6).	67.776.817.500	\$5.020.505
	3.3.3 Memantau pelaksanaan standar minimum.	14.643.240.000	\$1.084.684
	3.3.4 Mendukung pejabat SKPD KB dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk mengadakan pertemuan secara teratur dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan untuk advokasi.	72.421.410.000	\$5.364.549
	Keluaran 3.3 Sub Total	235.963.882.500	\$17.478.806
3.4	Keluaran 3.4: Meningkatkan kapasitas untuk melakukan advokasi berbasis bukti di semua tingkat pemerintahan dan di masyarakat yang terfokus pada peran penting KB dalam mencapai tujuan pembangunan serta untuk meningkatkan visibilitas program KB dan sumberdayanya		
	3.4.1 Mengembangkan strategi kabupaten/kota yang komprehensif untuk advokasi program KB (berdasarkan strategi nasional) dengan peta jalan untuk implementasi strategi pada semua jenjang termasuk di tingkat masyarakat serta menyusun daftar filik untuk memantau implementasi strategi ini.	17.122.060.000	\$1.268.301
	3.4.2 Mengembangkan materi pelatihan untuk pelatihan petugas media dan anggota parlemen dalam memberikan advokasi KB.	31.849.055.000	\$2.359.189
	3.4.3 Memantau pelaksanaan upaya advokasi.	62.853.930.000	\$4.655.847
	Keluaran 3.4 Sub Total	111.825.045.000	\$8.283.337
3.5	Keluaran 3.5: Meningkatkan kapasitas dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program KB dan menjamin pemerataan dan keberlanjutan program.		
	3.5.1 Melaksanakan kajian khusus tingkat provinsi mengenai kontribusi KB terhadap pembangunan sosial ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan.	32.262.880.000	\$2.389.843

No	Kegiatan		Biaya (Rupiah)	Biaya (US\$)
3.5.2	Mendukung pejabat KB tingkat kabupaten/kota dalam melakukan analisis alokasi anggaran tahunan untuk pelayanan KB, terutama untuk melacak anggaran operasional.		9.188.180.000	\$680.606
3.5.3	Mengembangkan kebijakan sumberdaya manusia setempat yang mendukung program yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Beberapa contohnya adalah: uraian kerja dan seleksi Kepala SKPD, penempatan bidang yang adil, kebijakan mengenai rotasi jabatan, penyesuaian antara pekerjaan dan kualifikasi, insentif berdasarkan kinerja untuk petugas kesehatan, dan sebagainya. Area kebijakan baru yang perlu dikembangkan meliputi uraian kerja PLKB, mekanisme perekrutan, distribusi (di jenjang mana di organisasi kabupaten), pemantauan kinerja, dll.		9.864.160.000	\$730.679
3.5.4	Mengkaji biaya transportasi untuk klien yang ingin mendapatkan pelayanan sterilisasi dan tidak tinggal dekat dengan rumah sakit (terkait dengan Output 1.1 dan Tujuan strategis 4)		1.620.000	\$1.200
3.5.5	Memberikan orientasi kepada Bupati/Walikota dan anggota parlemen tentang pentingnya KB dalam meningkatkan kesehatan ibu dan pembangunan sosial ekonomi serta perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk pelayanan dan manajemen program.		31.878.620.000	\$2.361.379
3.5.6	Meningkatkan kapasitas BAPPEDA untuk memasukkan KB ke rencana daerah.		2.645.350.000	\$195.952
Keluaran 3.5 Sub Total			85.855.390.000	\$6.359.659
3.6	Keluaran 3.6: Adanya sistem akuntabilitas yang fungsional yang melibatkan masyarakat madani			
3.6.1	Membangun kapasitas kelompok perempuan (kelompok kerja Hak dan Pemberdayaan) dan kelompok masyarakat madani lainnya sebagai pengawas untuk memantau pelanggaran hak klien, akses remaja dan pemuda ke pelayanan, dll. (terkait dengan Output 1.6)		36.194.210.000	\$2.681.053
3.6.2	Membentuk komite di Puskesmas dan rumah sakit dan membangun kapasitas mereka untuk menjamin hak klien terlindungi.		2.407.960.000	\$178.367
Keluaran 3.6 Sub Total			38.602.170.000	\$2.859.420
Tujuan Strategis 4: Berkembang dan diaplikasikannya inovasi dan bukti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, dan berbagi pengalaman melalui kerjasama Selatan-Selatan.				
4.1	Keluaran 4.1: Praktek terbaik dan model tersedia untuk meningkatkan Kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation)			
4.1.1	Evaluasi dan dokumentasi inovasi dalam program KB yang dilaksanakan di dalam negeri (termasuk proyek yang didanai oleh mitra pembangunan internasional) untuk kemungkinan replikasi		61.559.460.000	\$4.559.960
4.1.2	Identifikasi model untuk direplikasi dan dipromosikan dalam Kerjasama Selatan-Selatan		8.843.180.000	\$655.050
Keluaran 4.1 Sub Total			70.402.640.000	\$5.215.010
4.2	Keluaran 4.2: Penelitian operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB diterapkan, dievaluasi, serta diperluas			
4.2.1	Melaksanakan penelitian operasional untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas perencanaan program KB dan melakukan evaluasinya		31.295.220.000	\$2.318.164
4.2.2	Mengidentifikasi penelitian operasional yang efektif untuk dipromosikan dalam kerjasama Selatan-Selatan		75.400.000	\$5.585
Keluaran 4.2 Total			31.370.620.000	\$2.323.750
TOTAL			12.286.896.552.215	\$910.140.485

